REVISI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Laporan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja sebagai alat kendali dalam penilaian capaian kinerja berdasarkan Tugas Pokok Fungsi yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Selain itu, laporan kinerja merupakan bagian untuk evaluasi kinerja pada setiap individu maupun bidang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menggambarkan pencapaian kerja selama Tahun 2023 yang masih banyak kekurangan. Untuk itu, dapat diberikan masukan berupa saran dan kritik yang bermanfaat guna peningkatan kinerja yang lebih baik, sehingga hasil kerja untuk tahun-tahun selanjutnya dapat meningkat dan terwujud sepenuhnya dengan baik.

Dalam rangka pencapaian Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Perubahan RPJMD adalah **“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)”**. Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berkomitmen untuk maju dengan membangun desa dan menata Kota yang berarti untuk mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju merata antara desa dan kota harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai Visi diatas, maka Misi pembangunan jangka menengah dalam Perubahan RPJMD yang sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
2. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk itu sejak Tahun 2017 ditetapkan kebijakan dalam Bidang Sosial yakni, Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap, Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat. Sedangkan Kebijakan Bidang PPPA yakni, Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG, Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak, Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM Perempuan, Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak, dan Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak

Dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap, Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat ditetapkan Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk terwujudnya Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG, Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak, Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM Perempuan, Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait

pemenuhan hak anak, dan Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak.

LKjIP ini merupakan gambaran tingkat pencapaian Sasaran dan Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Sub kegiatan – Sub kegiatan sesuai dengan kegiatan serta program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tahun 2023 terdapat sasaran yang tertuang di dalam Revisi Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yakni, Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial, Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif, Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak. Secara garis besar kinerja organisasi dapat mencapai sasaran tersebut.

Demikian Revisi Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja dan peluang-peluang menuju perbaikan yang terus dilakukan.

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk



Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR BAGAN.....viii

DAFTAR DIAGRAM ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 3

1.4 Isu- isu Strategis..... 12

1.5 Sistematika Penulisan 12

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisar/ Ringkasan Renstra/ Renja..... 15

2.2 Perjanjian Kinerja..... 47

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja 49

3.2 Realisasi Anggaran..... 83

IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 90

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut selalu melakukan perbaikan kinerja sesuai dengan target yang telah di tentukan pada awal perencanaan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

C. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

1.A.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, menyelenggarakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
c. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
d. Pembinaan Aparatur;
e. Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
f. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran;
g. Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
h. Pembinaan dan Koordinasi Urusan Kepegawaian;
i. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional; dan
j. Pelaksanaan Fungsi Lain dang Diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkaitan dengan Tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan Urusan Persuratan;
b. Melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Kearsipan;
c. Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan, Keamanan dan Ketertiban Kantor;
d. Melaksanakan Pengelolaan Perlengkapan, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
e. Melaksanakan Urusan Kepegawaian, Pembinaan Aparatur dan Administrasi Jabatan Fungsional;
f. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
g. Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan oleh Sekretaris Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

3. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan rehabilitasi sosial serta jaminan sosial.

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial keluarga;
d. Pengembangan data pelayanan sosial orang dengan hiv/aids (odha) dan penyalahgunaan napza untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
b. Perumusan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem informasi data gender dan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
b. Perumusan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
c. Pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
d. Pelaksanaan koordinasi, singkronisasi, fasilitasi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak.

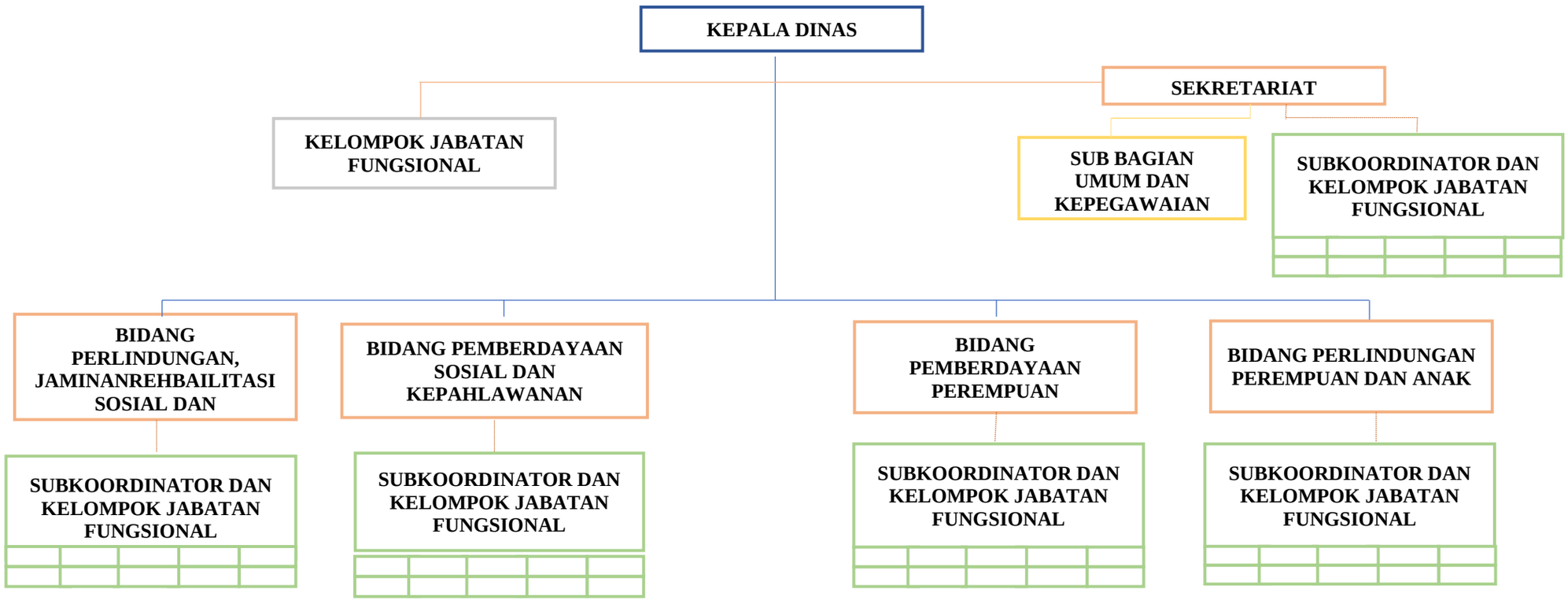
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;

c. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) sesuai amanat konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK



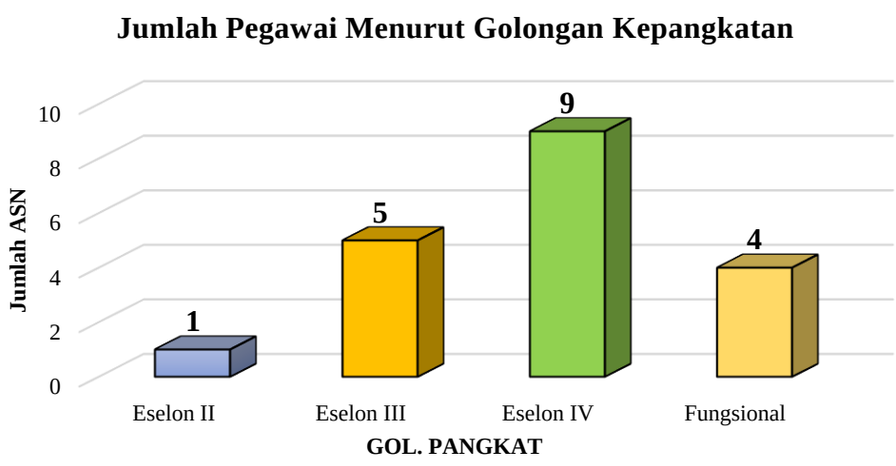
1.3.3 Kelompok Jabatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk di tahun 2023, yakni :

a. Eselon II = 1 orang
b. Eselon III = 5 orang
c. Eselon IV = 9 orang
d. Fungsional = 4 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh aparatur sebanyak 19 orang dengan perincian menurut golongan sebagai berikut:

Diagram 1. Kelompok Jabatan

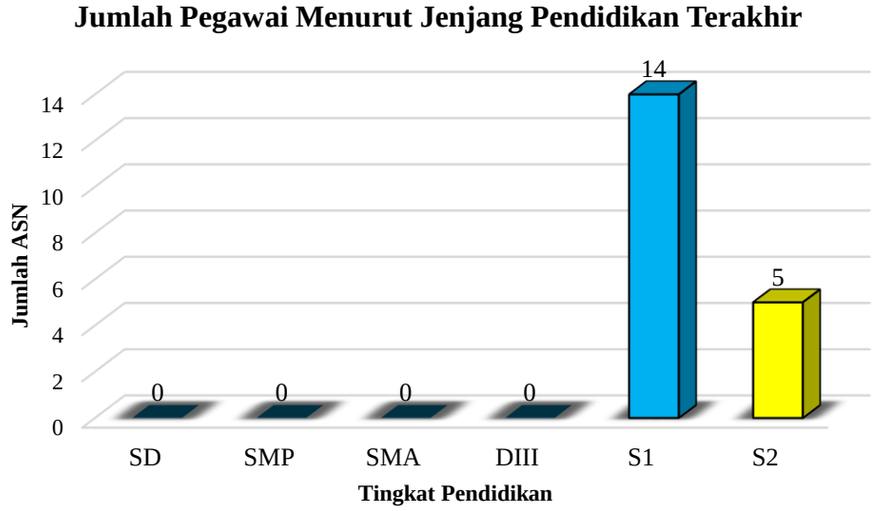


:

Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk

Kondisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menurut Tingkat Pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut :

Diagram 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPPA Kabupaten Nganjuk

1.3.4 Aspek Strategis

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pelayanan dapat ditinjau dari beberapa aspek strategis, antara lain :

1. Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan dalam bidang sosial terhadap 26 kategori PMKS/PPKS.
b. Melaksanakan jaminan dan rehabilitasi sosial terhadap 26 kategori PMKS/PPKS.
c. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Keringanan Biaya Berobat.
d. Memberikan bantuan sosial kepada Lansia Miskin, Penyandang Disabilitas, Siswa Miskin, dan LKSA

e. Bantuan Permakanan bagi PMKS/PPKS serta Korban Bencana Alam dan Sosial
f. Memberikan sosialisasi bagi lembaga maupun instansi dan rekomendasi perizinan terkait Pengumpulan Uang Berhadiah
g. Memberikan sosialisasi peningkatan tenaga PSKS (PSM, TKSK, dan Karang Taruna)
h. Memberikan Hibah kepada lembaga PMI dan *Woman Crisis Centre* (WCC)
i. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender
j. Melaksanakan sosialisasi kepada organisasi perempuan dan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga
k. Melaksanakan sosialisasi dan roadshow kepada masyarakat maupun lembaga pendidikan mengenai perlindungan perempuan dan anak.
l. Memberikan pendampingan, perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

D. Isu - Isu Strategis Dinas Sosial PPPA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu adanya penentuan isu strategis terkiat permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah untuk pemberian pelayanan tepat sasaran yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Isu Strategis Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang harus ditangani terbagi dalam urusan, yaitu :

1. Isu Strategis Bidang Sosial

a. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat;
b. Kebutuhan terhadap data kemiskinan yang terpadu, valid dan update semakin meningkat;
c. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat;
d. Pengelolaan data kemiskinan semakin terintegrasi guna mendukung kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

2. Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pemahaman masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak semakin meningkat;
b. Kesempatan perempuan dalam partisipasi di pemerintahan, politik, dan pembangunan semakin meningkat;
c. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam PUG semakin meningkat;

d. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak semakin meningkat;
e. Partisipasi masyarakat dalam penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk selama tahun 2023. Capaian Kinerja Tahun 2023 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

1.4 Isu-Isu Strategis Dinas Sosial PPPA

1.5 Sistematika Penulisan

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.7 Ikhtisar/ Ringkasan Renstra/ Renja

1.8 Perjanjian Kinerja pada Tahun yang Bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial PPPA

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Sebagai Perwujudan tanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen perencanaan Revisi Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Capaian Kinerja merupakan tolak ukur pada penetapan perjanjian kinerja Tahun 2023 sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah. Revisi Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk setelah adanya review yaitu:

Urusan Sosial

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Tujuan : 1. Tingkat Kemiskinan
2. Persentase Penurunan PMKS/PPKS

Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani
2. Persentase PMKS/PPKS menurun

Sasaran : Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif

1. Persentase jumlah PSKS yang aktif

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Tujuan : 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sasaran : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Indikator Sasaran : 1. Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat

Sasaran :Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

1. Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya
2. Persentase Kecamatan Layak Anak

Hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Capaian Tujuan Dinas Sosial PPPA Tahun 2023

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Kemiskinan	11,75	10,70 (BPS 2022)	109,81
2	Persentase Penurunan PMKS	3,87	4,97	77,86
3	Meningkatnya IPG	93,56	93,89 (BPS 2022)	100,35
4	Meningkatnya IDG	72	70,87 (BPS 2022)	98,43

Tabel 1.2 Capaian Sasaran Urusan Sosial Dinas Sosial PPPA Tahun 2023

Sasaran		Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	1.1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	95%	99,79%	105,04%
		1.2	Persentase PMKS/PPKS menurun	3,87%	4,97%	77,86%
2	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	2.1	Persentase jumlah PSKS yang aktif	65%	75,35%	115,92%
	Jumlah Rata-Rata Capaian Kinerja					99,60%

Tabel 1.3 Capaian Sasaran Urusan PPPA Dinas Sosial PPPA Tahun 2023

Sasaran		Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	1.1	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	45%	35%	77,77%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1.2	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100%	100%
		1.3	Persentase Kecamatan Layak Anak	15%	55%	366,66%
	Jumlah Rata-Rata Capaian Kinerja					**181,47%**

Anggaran belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sebesar Rp. 18.034.821.318,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 17.846.843.378,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.605.976.000,- , Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.908.167.378,- , Belanja Hibah sebesar Rp. 550.000.000,- dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.782.700.000,-. Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 187.977.940,- terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 151.977.940,- dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 36.000,-. Sedangkan penyerapan anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 17.437.573.089,- (96,69%) dari total anggaran Rp. 18.034.821.318,-. sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 memiliki tingkat keberhasilan sesuai harapan walaupun ada beberapa indikator yang kinerjanya perlu mendapat perhatian lebih untuk mencapai target yang ditentukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 memaparkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi sasaran indikator Kinerja Utama serta mengevaluasi dari sasaran dan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyusunan Laporan Kinerja disusun berdasarkan :

1. Revisi Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023
3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

A. Ikhtisar/ Ringkasan Renstra/ Renja

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan terarah dapat selaras dengan visi misi yang dilaksanakan. Revisi Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk memuat tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun.

Pada hakekatnya Revisi Review Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 merupakan perubahan dokumen renstra yang berisi komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan efektifitas, efisiensi, produktivitas serta derajat profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan anak.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk melakukan Revisi Review Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi pada Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dipengaruhi dan merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Revisi Review Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023.

Visi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 – 2023 dalam Perubahan RPJMD adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat”

(Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam Perubahan RPJMD yang sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial PPPA adalah **Misi ke - 3** yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang unggul.

Sasaran : 1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

3. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan serta sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk dapat mewujudkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 1 (satu) Tahun kedepan (2018 - 2023), ditetapkan strategi berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
• Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat • Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau • Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Meningkatkan kapasitas PSKS • Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat tanggap dalam menangani permasalahan sosial	- Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. - Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap - Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat
• Menyusun,mereview,mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. • Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG • Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak • Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. • Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan sehingga bisa menjadi tenaga profesional dan memberikan kontribusi pendapatan dalam perekonomian	- Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG. -Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak -Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan. -Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang - Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot. - Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak - Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
• Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat Kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak	

Strategi	Kebijakan
• Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.	

Keberhasilan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 2 Urusan dengan didukung alokasi anggaran Rp. 18.034.821.318, antara lain :

Urusan Sosial

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pemberdayaan Sosial

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penanganan Bencana

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Perempuan

a. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Indikator Tujuan dan Sasaran

Tujuan

a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
b. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, dalam rentang waktu masa Rencana Strategis (Tahunan, Semesteran, Tribulanan, atau Bulanan). Adapun penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran-sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial PPPA

No	Tujuan	No	Sasaran
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	a.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
		b.	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif
2.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
		b.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Sumber : Revisi Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 Dinas Sosial PPPA

Berdasarkan Revisi Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan mencakup 2 tujuan dan 4 sasaran untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Keempat sasaran tersebut dilaksanakan dalam 2 urusan yaitu, Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Tabel 2.3 Indikator Tujuan

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Kemiskinan	11,75	10,70 (BPS 2022)	109,81
2	Persentase Penurunan PMKS	3,87	4,97	77,86
3	Meningkatnya IPG	93,56	93,89 (BPS 2022)	100,35
4	Meningkatnya IDG	72	70,87 (BPS 2022)	98,43

Tabel 2.4 Indikator Sasaran Urusan Sosial

Sasaran		Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	1.1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	95%	99,79%	105,04%
		1.2	Persentase PMKS/PPKS menurun	3,87%	4,97%	77,86%
2	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	2.1	Persentase jumlah PSKS yang aktif	65%	75,35%	115,92%
	Jumlah Rata-Rata Capaian Kinerja					**99,60%**

Tabel 2.5 Indikator Sasaran Urusan PPPA

Sasaran		Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	1.1	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	45%	35%	77,77%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1.2	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100%	100%
		1.3	Persentase Kecamatan Layak Anak	15%	55%	366,66%
	Jumlah Rata-Rata Capaian Kinerja					**181,47%**

2.1.2 Rencana Kerja (Renja)

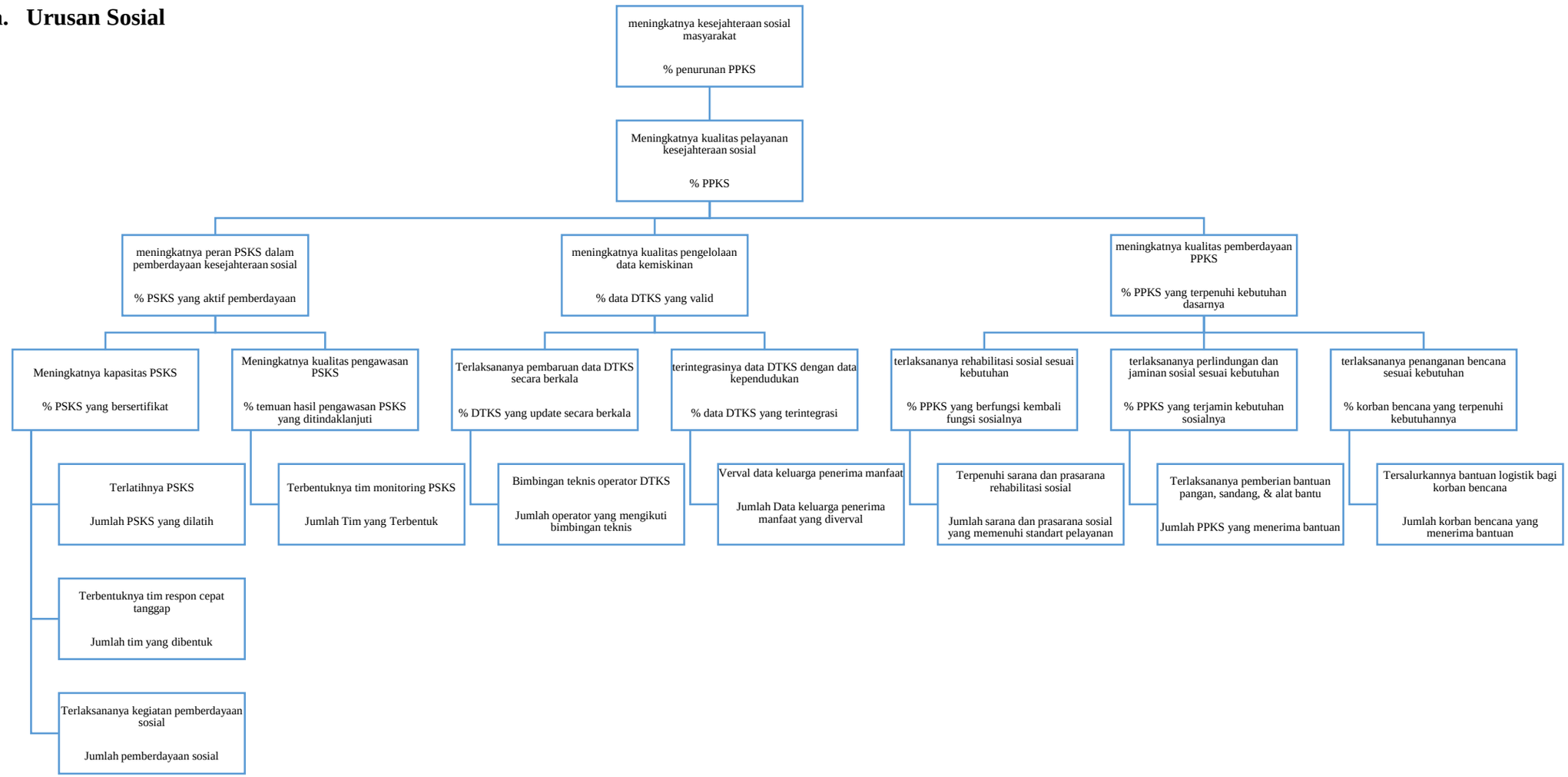
Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan mengacu pada dokumen Revisi Review Renstra Tahun 2018-2023. Rencana kerja memuat rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Berikut disampaikan Kerangka Logis dan Cacading Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023, sebagai berikut:

Bagan 2. Kerangka Logis Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

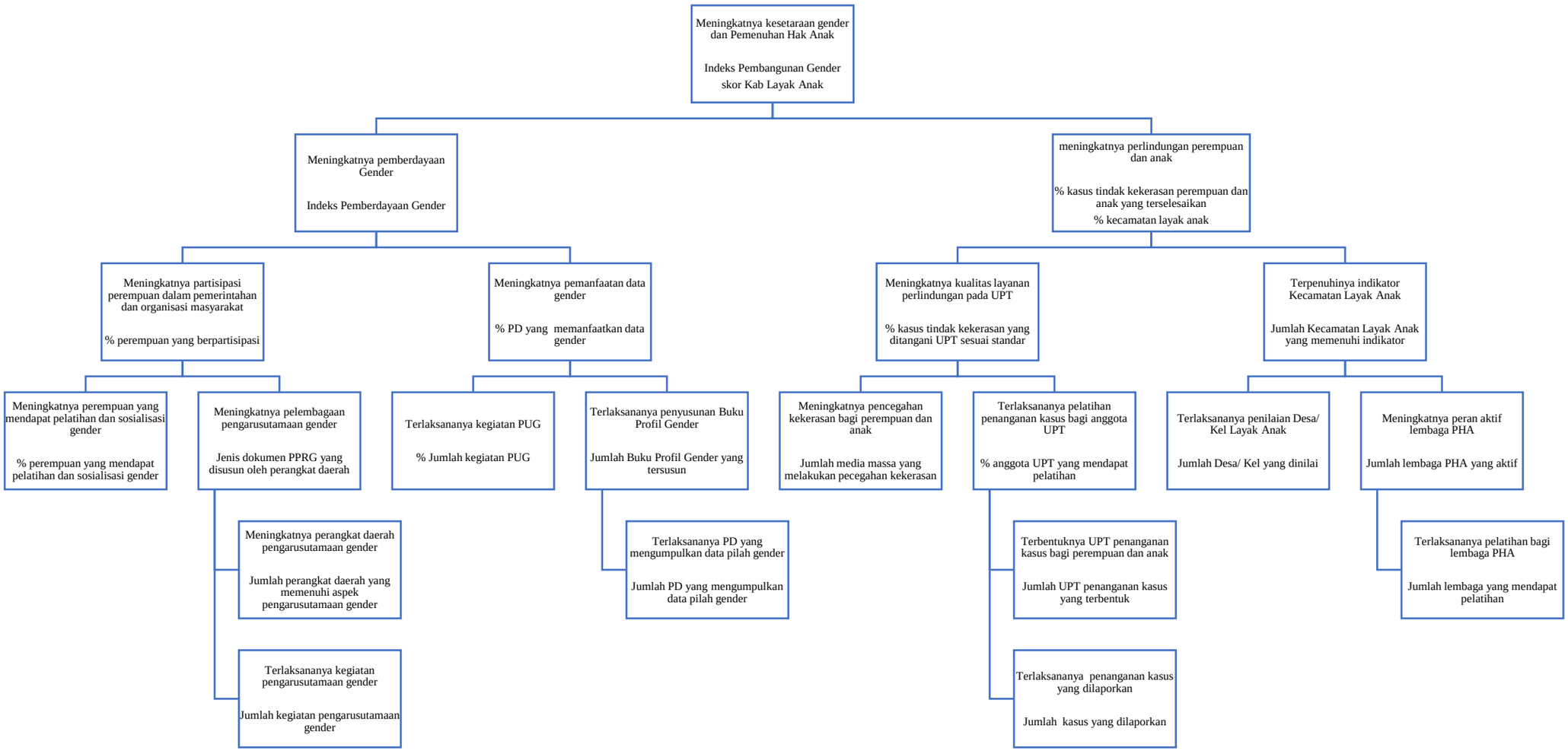


Bagan 3. Cascading Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Urusan Sosial



b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tingkat keberhasilan kinerja yang harus dicapai setelah kegiatan ditetapkan dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian kinerja merupakan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan dan bawahan dalam pemberian tanggungjawab kinerja . Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah.

2.2.1 Sasaran Kinerja Tahun 2023

Sasaran kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan sasaran kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

2.2.2 Standart Penilai Kinerja

Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial dengan indikator kinerja Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani, Persentase PMKS/PPKS Menurun. Sedangkan Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif dengan indikator kinerja Persentase Jumlah PSKS yang aktif.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan indicator kinerja Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat. Sedangkan Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dengan indicator Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya dan Persentase Kecamatan Layak Anak.

Tabel 2.6 Sasaran Urusan Sosial dan PPPA Dinas Sosial PPPA
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	a. Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	95%	
		b. Persentase PMKS/PPKS menurun	3,87%	
2	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	a. Persentase jumlah PSKS yang aktif	65%	
3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	a. Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	45%	
4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	b. Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	
		c. Persentase Kecamatan Layak Anak	15%	

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	5.255.285.500	DAU - APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp.	366.882.750	DAU - APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp.	2.195.326.950	DAU - APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	7.051.117.200	DAU - APBD
5	Penanganan Bencana	Rp.	340.937.450	DAU - APBD
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	70.037.750	DAU - APBD
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	291.000.000	DAU - APBD
8	Perlindungan Perempuan	Rp.	222.826.800	DAU - APBD
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	145.831.050	DAU - APBD
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	18.530.000	DAU - APBD
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	349.760.450	DAU - APBD
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	167.784.400	DAU - APBD
Jumlah Total		Rp.	**16.475.320.300**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada pelaksanaan Program pembangunan pemerintah dalam mencapai kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Nganjuk mengukur capaian kinerja berdasarkan target yang sudah ditentukan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis terhadap capaian indikator kinerja sebagai berikut:

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

a. Capaian Kinerja Bidang Urusan Sosial dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Tujuan Dinas Sosial PPPA

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Kemiskinan	11,75	10,70 (BPS 2022)	109,81
2	Persentase Penurunan PMKS	3,87	4,97	77,86
3	Meningkatnya IPG	93,56	93,89 (BPS 2022)	100,35
4	Meningkatnya IDG	72	70,87 (BPS 2022)	98,43

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Urusan Sosial Dinas Sosial PPPA

Sasaran		Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	1.1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	95%	99,79%	105,04%
		1.2	Persentase PMKS/PPKS menurun	3,87%	4,97%	77,86%
2	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	2.1	Persentase jumlah PSKS yang aktif	65%	75,35%	115,92%
	Jumlah Rata-Rata Capaian Kinerja					99,60%

Analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran **"Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial"** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani :

- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2023 — 56.611 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang tertangani Tahun 2023 — 56.493 Orang
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani th.2023 — 99,79%
- Target Renstra Tahun 2023 — 95 %
- Capaian Kinerja Tahun 2023 — 105,04 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 105,04 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 95 %.

Persentase Jumlah PMKS/PPKS Menurun

- Jumlah penduduk tahun 2023 1.139.617 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang terdata th. 2023 sebanyak 56.611 Orang
- Persentase PMKS/ PPKS terhadap jumlah penduduk th. 2023 4,97 %
- Target Renstra tahun 2023 3,87 %
- Capaian Kinerja Tahun 2023 77,86 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 77,86 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 3,87 %.

Analisa terhadap pencapaian Sasaran **"Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif"** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase jumlah PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif

Tabel 3.4 Jumlah PSKS Dinas Sosial PPPA

No.	Jenis PSKS	Jumlah Anggota	Anggota Aktif	Anggota Tidak Aktif	Aktif %
1.	Pekerja Sosial Profesional	0	0	0	100
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	117	80	37	68,37
3.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	18	18	0	100
4.	Organisasi Sosial	27	27	0	100
5.	Karang Taruna	305	222	83	72,78
6.	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat)	20	20	0	100
	Jumlah/Persentase yang Aktif	**487**	**367**	**120**	**75,35**

Indikator Sasaran/Kinerja dalam sasaran **"Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial serta Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif"** dapat diukur dengan indikator

Persentase jumlah PSKS yang aktif

- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2023 487 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2023 367 Orang
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2023 75,35%
- Target Renstra Tahun 2023 65 %
- Capaian Kinerja Tahun 2023 115,92 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 115,92 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 65%.

b. Capaian Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Sasaran Urusan PPPA Dinas Sosial PPPA

Sasaran		Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	1.1	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	45%	35%	77,77%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1.2	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100%	100%
		1.3	Persentase Kecamatan Layak Anak	15%	55%	366,66%
	Jumlah Rata-Rata Capaian Kinerja					**181,47%**

Sasaran "**Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender**" diukur dengan sasaran indikator sebagai berikut:

Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara perempuan yang menduduki jabatan struktural terhadap jabatan struktural yang ada pada Tahun sebagai berikut:

- Jumlah ASN se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 7.550 orang
- Jumlah ASN Perempuan se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 4.341 orang
- Jumlah ASN Laki-Laki se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 3.209 orang
- Jumlah Jabatan Struktural yang ada Tahun 2023 369 jabatan
- Jumlah ASN perempuan se Kabupaten Nganjuk yang Menduduki jabatan struktural Tahun 2023 130 orang
- Target Renstra Tahun 2023 45 %
- Persentase ASN perempuan yang menduduki Jabatan struktural Tahun 2023 35 %

  (∑ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural / ∑ Jabatan Struktural yang ada x 100%)
- Capaian kinerja indikator Tahun 2023 77,77 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 77,77% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 45%.

Sasaran **"Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak"** diukur dengan sasaran indikator sebagai berikut:

Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking Terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya

Indikator ini menggambarkan peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak. Kekerasan yang pada umumnya terjadi pada perempuan maupun anak diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kasus penelantaran serta lainnya.

Data dan capaian Tahun 2023 sebagai berikut :

- Jumlah kasus kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2023 — 76 Kasus
- Jumlah kasus tindak kekerasan dan traficking dilaporkan Tahun 2023 — 76 kasus
- Target Renstra Tahun 2023 — 100%
- Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2023 — 100 %
- Capaian kinerja indikator Tahun 2023 — 100 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 100%.

Persentase Kecamatan Layak Anak

Data dan capaian Tahun 2023 sebagai berikut :

- Jumlah Kecamatan se Kabupaten Nganjuk Th. 2023 — 20 Kec.
- Jumlah Kecamatan yang sudah Mempunyai SK Gugus Tugas Layak Anak Tahun 2023 — 11 Kecamatan
- Target Kecamatan Layak Anak Th. 2023 — 15 %
- Persentase Kecamatan Layak Anak Th. 2023 — 55 %
- Capaian kinerja Th. 2023 — 366,66 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 366,66 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 15%.

A.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

Bidang Urusan Sosial

Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Urusan Sosial Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran		Indikator Kinerja		Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	1.1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	92%	97,80 %	106,30 %	94%	99,26%	106,38 %	95%	99,79%	105,04 %
		1.2	Persentase jumlah PMKS/PPKS menurun	4,37 %	4,76 %	91,80 %	3,97 %	4,87%	81,51%	3,87 %	4,97%	77,86%
2	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	2.1	Persentase jumlah PSKS yang aktif	55%	68,37%	124,30 %	60%	71,40%	119%	65%	75,35%	115,92 %
	Jumlah Rata-Rata Capaian Kinerja			**107,46%**			**102,29%**			**99,60%**		

Analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran **"Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial"** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani :

- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2023 56.611 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2022 54.435 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang tertangani Tahun 2023 56.493 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang tertangani Tahun 2022 54.435 Orang
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani th.2023 99,79%
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani th.2022 100%
- Target Renstra Tahun 2023 95 %
- Target Renstra Tahun 2022 94 %
- Capaian Kinerja Tahun 2023 105,04 %
- Capaian Kinerja Tahun 2022 106,38 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 105,04 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 95 %. Bila dibandingkan dengan realisasi penanganan PMKS/PPKS tahun 2022 ada sedikit penurunan sebesar 0,21% yaitu dari 100% menjadi 99,79% dan capaian untuk kinerjanya turun sebesar 1,34% dari 106,38% menjadi 105,04% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

Persentase Jumlah PMKS/PPKS Menurun

- Jumlah penduduk tahun 2023 1.139.617 Orang
- Jumlah penduduk tahun 2022 1.117.033 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang terdata th. 2023 sebanyak 56.611 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang terdata th. 2022 sebanyak 54.435 Orang
- Persentase PMKS/ PPKS terhadap jumlah penduduk th. 2023 4,97 %
- Persentase PMKS/ PPKS terhadap jumlah penduduk th. 2022 4,87 %
- Target Renstra tahun 2023 3,87 %
- Target Renstra tahun 2022 3,97 %
- Capaian Kinerja Tahun 2023 77,86 %
- Capaian Kinerja Tahun 2022 81,51%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 77,86 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 3,87 %. Bila dibandingkan dengan realisasi Jumlah PMKS/PPKS Menurun Tahun 2022 ada sedikit kenaikan sebesar 0,1% yaitu dari 4,87% menjadi 4,97% dan capaian untuk kinerjanya turun sebesar 3,65% dari 81,51% menjadi 77,86% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

Analisa terhadap pencapaian Sasaran **"Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif"** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Jumlah PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang Aktif

Tabel 3.7 Jumlah PSKS Tahun 2023 Dinas Sosial PPPA

No.	Jenis Psks	Jumlah Anggota	Anggota Aktif	Anggota Tidak Aktif	Aktif %
1.	Pekerja Sosial Profesional	0	0	0	100
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	117	80	37	68,37
3.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	18	18	0	100
4.	Organisasi Sosial	27	27	0	100
5.	Karang Taruna	305	222	83	72,78
6.	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat)	20	20	0	100
	Jumlah/Persentase yang Aktif	**487**	**367**	**120**	**75,35**

Tabel 3.8 Jumlah PSKS Tahun 2022 Dinas Sosial PPPA

No.	Jenis PSKS	Jumlah Anggota	Anggota Aktif	Anggota Tidak Aktif	Aktif
					%
1.	Pekerja Sosial Profesional	3	3	0	100
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	645	361	284	55,96
3.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	18	18	0	100
4.	Organisasi Sosial	22	22	0	100
5.	Karang Taruna	285	285	0	100
6.	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat)	20	20	0	100
	Jumlah/Persentase yang Aktif	**993**	**709**	**284**	**71,40**

Indikator Sasaran/Kinerja dalam sasaran **"Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial serta Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif"** dapat diukur dengan indikator

Persentase jumlah PSKS yang aktif

- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2023 487 Orang
- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2022 993 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2023 367 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2022 709 Orang
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2023 75,35%
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2022 68,36%
- Target Renstra Tahun 2023 65 %
- Target Renstra Tahun 2022 60 %
- Capaian Kinerja Tahun 2023 115,92 %
- Capaian Kinerja Tahun 2022 119 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 115,92 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 65%. Bila dibandingkan dengan realisasi PSKS yang aktif Tahun 2022 ada sedikit kenaikan sebesar 6,99% yaitu dari 68,36% menjadi 75,35% dan capaian untuk kinerjanya turun sebesar 3,08% dari 119% menjadi 115,92% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.9 Realisasi Sasaran Urusan PPPA Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran		Indikator Sasaran		Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	1.1	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	35%	32,78%	93,68 %	40%	31,45%	78,62 %	45%	35%	77,77 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1.2	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase Kecamatan Layak Anak	5%	5%	100%	10%	40%	400%	15%	55%	366,66 %
	Jumlah rata-rata pencapaian kinerja			**97,89%**			**99,19%**			**181,47%**		

Sasaran "**Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender**" diukur dengan sasaran indikator sebagai berikut:

Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara perempuan yang menduduki jabatan struktural terhadap jabatan struktural yang ada pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

- Jumlah ASN se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 7.550 orang
- Jumlah ASN se Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 8.135 orang
- Jumlah ASN Perempuan se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 4.341 orang
- Jumlah ASN Perempuan se Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 4.761 orang
- Jumlah ASN Laki-Laki se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 3.209 orang
- Jumlah ASN Laki-Laki se Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 3.374 orang
- Jumlah Jabatan Struktural yang ada Tahun 2023 369 jabatan
- Jumlah Jabatan Struktural yang ada Tahun 2022 372 jabatan
- Jumlah ASN perempuan se Kabupaten Nganjuk yang Menduduki jabatan struktural Tahun 2023 130 orang
- Jumlah ASN perempuan se Kabupaten Nganjuk yang 117 orang

Menduduki jabatan struktural Tahun 2022

- Target Renstra Tahun 2023 45 %
- Target Renstra Tahun 2022 40 %
- Persentase ASN perempuan yang menduduki Jabatan struktural Tahun 2023 35 %
- Persentase ASN perempuan yang menduduki Jabatan struktural Tahun 2022 31,45 %

(∑ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural / ∑ Jabatan Struktural yang ada x 100%)

- Capaian kinerja indikator Tahun 2023 77,77 %
- Capaian kinerja indikator Tahun 2022 97,57 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 77,77% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 45%. Bila dibandingkan dengan realisasi ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2022 ada kenaikan sebesar 3,55% yaitu dari 31,45% menjadi 35% dan capaian untuk kinerjanya ada penurunan sebesar 19,8% dari 97,57% menjadi 77,77% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

Sasaran **"Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak"** diukur dengan sasaran indikator sebagai berikut:

Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking Terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya

Indikator ini menggambarkan peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak. Kekerasan yang pada umumnya terjadi pada perempuan maupun anak diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kasus penelantaran serta lainnya.

Data dan capaian Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

- Jumlah kasus kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2023 76 Kasus
- Jumlah kasus kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2022 53 Kasus
- Jumlah kasus tindak kekerasan dan traficking dilaporkan Tahun 2023 76 kasus
- Jumlah kasus tindak kekerasan dan traficking dilaporkan Tahun 2022 53 kasus
- Target Renstra Tahun 2023 100%
- Target Renstra Tahun 2022 100%
- Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking 100 %

yang difasilitasi Tahun 2023

- Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2022 — 100 %
- Capaian kinerja indikator Tahun 2023 — 100 %
- Capaian kinerja indikator Tahun 2022 — 100 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking Terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya Tahun 2022 sama sebesar 100% yaitu dari 100% menjadi 100% dan capaian untuk kinerjanya tetap sama dari 100% menjadi 100% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

Persentase Kecamatan Layak Anak

Data dan capaian Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

- Jumlah Kecamatan se Kabupaten Nganjuk Th. 2023 — 20 Kec.
- Jumlah Kecamatan se Kabupaten Nganjuk Th. 2022 — 20 Kec.
- Jumlah Kecamatan yang sudah Mempunyai SK Gugus Tugas Layak Anak Tahun 2023 — 11 Kecamatan
- Jumlah Kecamatan yang sudah Mempunyai SK Gugus Tugas Layak Anak Tahun 2022 — 8 Kecamatan
- Target Kecamatan Layak Anak Th. 2023 — 15 %
- Target Kecamatan Layak Anak Th. 2022 — 10 %
- Persentase Kecamatan Layak Anak Th. 2023 — 55 %
- Persentase Kecamatan Layak Anak Th. 2022 — 40 %
- Capaian kinerja Th. 2023 — 366,66 %
- Capaian kinerja Th. 2022 — 400 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 366,66 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 15%. Bila dibandingkan dengan realisasi Kecamatan Layak Anak Tahun 2022 naik sebesar 15% yaitu dari 40% menjadi 55% dan capaian untuk kinerjanya mengalami penurunan sebesar 33,34 dari 400% menjadi 366,66% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.10 Target Revisi Review Resntra Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**	**Tingkat Kemiskinan**	**-**	**-**	**11,85%**	**11,80%**	**11,75%**
		Persentase Penurunan PMKS/PPKS	**-**	**-**	**4,47%**	**4,17**	**3,87%**
	Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	88%	90%	92%	94%	95%
		Persentase Jumlah PMKS/ PPKS menurun	5,17%	7,94%	4,47%	4,17	3,87%
	Sasaran Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	45%	50%	55%	60%	65%
2.	**Tujuan Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Meningkatnya IPG**	**-**	**-**	**93,36%**	**93,46%**	**93,56%**
		Meningkatnya IDG	**-**	**-**	**69%**	**71%**	**72%**
	Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	25%	30%	35%	40%	45%
	Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kecamatan Layak Anak	15%	5%	5%	10%	15%

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Keamjuan (%)
1.	**Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**	**Tingkat Kemiskinan**	**11,75%**	**10,70% (Data 2022)**	**91,06**
		Persentase Penurunan PMKS/PPKS	3,87%	4,97%	128,4
	Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	95%	99,79%	105,04
		Persentase Jumlah PMKS/ PPKS menurun	3,87%	4,97%	128,42
	Sasaran Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	65%	75,35%	115,92
2.	**Tujuan Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dan**	**Meningkatnya IPG**	**93,56%**	**93,89% (Data 2022)**	100.35
		Meningkatnya IDG	**72%**	**70,87% (Data 2022)**	**98.43**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Keamjuan (%)
	Perlindungan Anak				
	Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	45%	35%	77,77
	Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100%	100
		Persentase Kecamatan Layak Anak	15%	55%	366,6

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA	Target RPJMD Tahun 2022	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sebelum Perubahan																			
1	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	11,80%	94%	-	88%	90%	92%	-	-	93,09f%	93,09%	97,80%	-	-	95%	97%	106,30%	-	-
2	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS menurun	4,17%	3,97%	-	5,17%	7,94%	4,47%	-	-	5,97%	5,97%	4,76%	-	-	87%	80%	91,80%	-	-
3	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	11,80%	60%	-	45%	50%	55%	-	-	73,75%	73,75%	68,37%	-	-	61%	68%	124,30%	-	-
4	Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat	93,46%	40%	-	25%	30%	35%	-	-	33,68%	33,68%	32,78%	-	-	74%	89%	93,68%	-	-
5	Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	71%	100%	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
6	Persentase Kecamatan Layak Anak	71%	75%	-	15%	5%	5%	-	-	25%	25%	5%	-	-	60%	100%	100%	-	-
Setelah Perubahan																			
1	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	11,75%	95%	-	-	-	-	94%	95%	-	-	-	100%	99,79%	-	-	-	106,38%	105,04%
2	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS menurun	3,87%	3,87%	-	-	-	-	4,17	3,87%	-	-	-	4,87%	4,97%	-	-	-	85,62%	77,86%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA	Target RPJMD Tahun 2022	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	11,80%	65%	-	-	-	-	60%	65%	-	-	-	71,40%	75,35%	-	-	-	119%	115,92%
4	Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat	93,56%	45%	-	-	-	-	40%	45%	-	-	-	31,45%	35%	-	-	-	78,62%	77,77%
5	Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	72%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
6	Persentase Kecamatan Layak Anak	72%	15%	-	-	-	-	10%	15%	-	-	-	40%	55%	-	-	-	400%	366,66%

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standart Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Level Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Tingkat Daerah Tahun 2023

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Kemiskinan	11,75	10,70 (BPS 2022)	109,81
2	Persentase Penurunan PMKS	3,87	4,97	77,86
3	Meningkatnya IPG	93,56	93,89 (BPS 2022)	100,35
4	Meningkatnya IDG	72	70,87 (BPS 2022)	98,43

Tabel 3.15 Realisasi Tingkat Nasional Tahun 2023

No	Indikator	Tingkat Daerah	Tingkat Nasional
		Realisasi (%)	Realisasi (%)
1	Tingkat Kemiskinan	10,70 (BPS 2022)	9,36 (BPS Maret 2023)
2	Persentase Penurunan PMKS	4,97	-
3	Meningkatnya IPG	93,89 (BPS 2022)	91,63 (BPS 2022)
4	Meningkatnya IDG	70,87 (BPS 2022)	76,59 (BPS 2022)

Berdasarkan realisasi tingkat daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk terdapat 4 indikator, sedangkan realisasi tingkat nasional terdapat 3 indikator yang menjadi perbandingan. Indikator Tingkat kemiskinan mempunyai selisih sebesar 1,34% antara tingkat daerah sebesar 10,70% dan tingkat nasional 9,36%. Indikator Meningkatnya IPG mempunyai selisih sebesar 2,26% antara tingkat daerah sebesar 93,89% dan tingkat nasional 91,63%. Indikator Meningkatnya IDG mempunyai selisih sebesar 5,72% antara tingkat daerah sebesar 70,87% dan tingkat nasional 76,59%.

A.5 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.16 Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak Tercapai
	Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	**Tingkat Kemiskinan**	**109,81%**	**Tercapai**
		Persentase Penurunan PMKS/PPKS	**77,86%**	**Tercapai**
	Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	105,04%	Tercapai
		Persentase Jumlah PMKS/ PPKS menurun	77,86%	Tercapai
	Sasaran Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	115,92%	Tercapai
	Tujuan Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Meningkatnya IPG**	**100,35%**	**Tercapai**
		Meningkatnya IDG	**98,43%**	**Tercapai**
	Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	77,77%	Tercapai
	Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	Tercapai
		Persentase Kecamatan Layak Anak	366,66%	Tercapai

Berdasarkan tabel 3.16, adapun penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial"*** sebagai berikut:

a. Peningkatan jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS
b. Pemberian bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pemberian bantuan sosial permakanan untuk orang terlantar serta 21 lembaga kesejahteraan sosial anak.
b. Pemberian bantuan sosial untuk Lansia Miskin, Siswa Miskin dan DBHCHT serta pemutakhiran DTKS.
c. Penyediaan permakanan dan penanganan khusus bagi kelompok rentan melalui pemberian bantuan shelter dan logistik lainnya bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

Penunjang pencapaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif"*** sebagai berikut

a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan undian gratis berhadiah, peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan manajemen dan operasional lembaga sosial dan 20 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menghadapi permasalahan sosial. Serta upaya pembinaan dan penindakan terhadap para penyelenggaraan pembinaan warakawuri keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan pemberian santunan bagi veteran. Koordinasi dalam pelaksanaan Renungan suci, Tabur Bunga Dan Ziarah Pahlawan

Penunjang pencapaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender"*** sebagai berikut

a. Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah kabupaten nganjuk, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan inovasi Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marjinal (Disabilitas dan Kelompok Rentan) serta Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG

Penunjang pencapaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak"*** sebagai berikut

a. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan perlindungan perempuan dan anak dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tidak takut atau malu karena sudah mendapatkan

pengetahuan bagaimana cara melaporkan tindak kekersan yang dialami. Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan dengan dibentuknya Satgas PPA bersama Unit PPA Polres Kab. Nganjuk. Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan dari total 20 (dua puluh) Kecamatan.

A.6 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Anggaran

3.1.6 Tingkat Efesiensi Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tabel 3.17. Tingkat Efesiensi Tujuan Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efesiensi
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	109,81	84,45	25,36
	Persentase penurunan PMKS/ PPKS	77,86	84,23	6,37
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,35	94,13	6,22
	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	98,43	94,13	4,3

Tabel 3.18 Tingkat Efesiensi Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	%Tingkat Efesiensi
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	105,04	84,23	20,81
	Persentase PMKS/PPKS menurun	77,86	84,23	6,37
Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	Persentase jumlah PSKS yang aktif	115,92	95,37	20,55
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	77,77	94,07	16,3
Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100	96,58	3,42
	Persentase Kecamatan Layak Anak	366,66	92,47	274,19

Urusan Sosial

Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Indikator Sasaran : Persentase Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani

: Persentase PMKS/PPKS Menurun

Kedua indikator sasaran di atas didukung oleh 4 (empat) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.761.305.818,- terealisasi sebesar Rp. 16.221.841.067,- atau 96,78%.

Sasaran : Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif

Indikator Sasaran : Persentase jumlah PSKS yang aktif

Indikator sasaran di atas didukung oleh 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan, dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 485.657.300,- terealisasi sebesar Rp. 468.105.000,- atau 96,39%.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Indikator Sasaran : Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat

Indikator sasaran di atas didukung oleh 3 (tiga) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 349.761.500,- terealisasi sebesar Rp. 325.229.465,- atau 92,99%.

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Indikator Sasaran : Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya

Indikator sasaran di atas didukung oleh 3 (tiga) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 327.128.300,- terealisasi sebesar Rp. 313.655.090,- atau 95,88%.

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Indikator Sasaran : Persentase Kecamatan Layak Anak

Indikator sasaran di atas didukung oleh 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan, dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.968.400,- terealisasi sebesar Rp. 108.742.467,- atau 97,99%.

A.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	96%
	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	75%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat	100%
	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif	100%
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang, Tenaga Kesejahteraan, Keluarga, Lembaga yang Meningkat Kapasitasnya serta Jumlah Sertifikat dari Hasil Peningkatan Jumlah Kapasitas	100%
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	93%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	91%
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	95%

		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%
		Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan PMKS	100%
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	100%
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Fasilitasi TMP	100%
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100%
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang PPPA				
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	100%
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Ko ta dan Terlaksananya Workshop bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi	100%
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	100%
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan terhadap Kabupaten/ Kota yang Mendapat Layanan Pengaduan dan Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan; Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas; Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Spesifik; Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100%
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	100%

		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Keluarga yang melaksanakan pendidikan Kesetaraan Gender dalam Keluarga	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengambangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten	100%
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	100%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam Aplikasi; Jumlah Data Gender dan Anak Bahan Analisis dan Penyajian Data	100%
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100%
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Gugus Tugas Kabupaten dan Jumlah Penguatan Kecamatan Layak Anak	100%
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	100%
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi serta penguatan Kelembagaan KLA,Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak, Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	100%

B. Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk dengan program-program dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.20 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2023
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Rp 18,034,821,318**	**Rp 17,437,573,089**	**Rp 597,248,229**	**96.69**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**Rp 17,246,963,118.00**	**Rp 16,689,946,067.00**	**Rp 557,017,051.00**	**96.77**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**Rp 17,246,963,118.00**	**Rp 16,730,146,067.00**	**Rp 516,817,051.00**	**97.00**
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Rp 17,246,963,118.00**	**Rp 16,730,146,067.00**	**Rp 516,817,051.00**	**97.00**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 5,023,000,318.00**	**Rp 4,643,730,600.00**	**Rp 379,269,718.00**	**92.45**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 22,887,000.00**	**Rp 22,860,500.00**	**Rp 26,500.00**	**99.88**
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 12,150,000.00	Rp 12,141,000.00	Rp 9,000.00	99.93
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10,737,000.00	Rp 10,719,500.00	Rp 17,500.00	99.84
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 3,790,035,000.00**	**Rp 3,460,405,477.00**	**Rp 329,629,523.00**	**91.30**
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,508,056,000.00	Rp 3,185,738,972.00	Rp 322,317,028.00	90.81
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 274,719,000.00	Rp 269,803,005.00	Rp 4,915,995.00	98.21
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3,630,000.00	Rp 3,412,500.00	Rp 217,500.00	94.01
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 3,630,000.00	Rp 1,451,000.00	Rp 2,179,000.00	39.97
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp 87,500,000.00**	**Rp 85,750,000.00**	**Rp 1,750,000.00**	**98.00**
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp 87,500,000.00	Rp 85,750,000.00	Rp 1,750,000.00	98.00

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 249,357,470.00**	**Rp 246,632,913.00**	**Rp 2,724,557.00**	**98.91**
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 11,147,460.00	Rp 10,735,250.00	Rp 412,210.00	96.30
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp129,052,850.00	Rp126,870,220.00	Rp 2,182,630.00	98.31
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp50,188,910.00	Rp50,173,400.00	Rp 15,510.00	99.97
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1,800,000.00	Rp1,800,000.00	Rp -	100.00
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp33,314,000.00	Rp33,297,043.00	Rp 16,957.00	99.95
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp23,854,250.00	Rp23,757,000.00	Rp 97,250.00	99.59
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp127,819,848.00**	**Rp127,157,400.00**	**Rp 662,448.00**	**99.48**
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp127,819,848.00	Rp127,157,400.00	Rp 662,448.00	99.48
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp221,000,000.00**	**Rp183,368,171.00**	**Rp 37,631,829.00**	**82.97**
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2,000,000.00	Rp1,217,960.00	Rp 782,040.00	60.90
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp144,000,000.00	Rp107,159,911.00	Rp 36,840,089.00	74.42
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp75,000,000.00	Rp74,990,300.00	Rp 9,700.00	99.99
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 524,401,000.00**	**Rp 517,556,139.00**	**Rp 6,844,861.00**	**98.69**
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp262,300,500.00	Rp261,205,556.00	Rp 1,094,944.00	99.58
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Rp8,504,400.00	Rp8,501,500.00	Rp 2,900.00	99.97
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp22,500,000.00	Rp22,500,000.00	Rp -	100.00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 231,096,100.00	Rp 225,349,083.00	Rp 5,747,017.00	97.51
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Rp417,627,800.00**	**Rp407,733,128.00**	**Rp 9,894,672.00**	**97.63**
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp13,961,800.00**	**Rp12,971,800.00**	**Rp 990,000.00**	**92.91**
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Rp13,961,800.00	Rp12,971,800.00	Rp 990,000.00	92.91

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	Pengumpulan Uang atau Barang				
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp403,666,000.00**	**Rp394,761,328.00**	**Rp 8,904,672.00**	**97.79**
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp44,966,400.00	Rp42,677,400.00	Rp 2,289,000.00	94.91
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp271,287,300.00	Rp268,972,628.00	Rp 2,314,672.00	99.15
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp87,412,300.00	Rp83,111,300.00	Rp 4,301,000.00	95.08
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Rp 68,029,500**	**Rp 60,371,872**	**Rp 7,657,628**	**88.74**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Rp68,029,500.00**	**Rp60,371,872.00**	**Rp 7,657,628.00**	**88.74**
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp68,029,500.00	Rp60,371,872.00	Rp 7,657,628.00	88.74
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Rp 7,659,039,750.00**	**Rp 7,550,604,767.00**	**Rp 108,434,983.00**	**98.58**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Rp 6,625,290,550.00**	**Rp 6,531,077,886.00**	**Rp 94,212,664.00**	**98.58**
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp37,216,800.00	Rp33,517,980.00	Rp 3,698,820.00	90.06
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp514,000,000.00	Rp492,277,500.00	Rp 21,722,500.00	95.77
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp5,535,245,750.00	Rp5,481,982,185.00	Rp 53,263,565.00	99.04
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 538,828,000.00	Rp 523,300,221.00	Rp 15,527,779.00	97.12
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan**	**Rp1,033,749,200.00**	**Rp1,019,526,881.00**	**Rp 14,222,319.00**	**98.62**

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	NAPZA di Luar Panti Sosial				
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Rp301,134,250.00	Rp295,636,750.00	Rp 5,497,500.00	98.17
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp206,214,950.00	Rp197,490,131.00	Rp 8,724,819.00	95.77
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00	Rp -	100.00
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Rp521,400,000.00	Rp521,400,000.00	Rp -	100.00
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Rp3,861,787,700.00**	**Rp3,811,601,200.00**	**Rp 50,186,500.00**	**98.70**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp3,861,787,700.00**	**Rp3,811,601,200.00**	**Rp 50,186,500.00**	**98.70**
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp40,326,400.00	Rp39,591,200.00	Rp 735,200.00	98.18
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp3,821,461,300.00	Rp3,772,010,000.00	Rp 49,451,300.00	98.71
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Rp217,478,050.00**	**Rp215,904,500.00**	**Rp 1,573,550.00**	**99.28**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Rp217,478,050.00**	**Rp215,904,500.00**	**Rp 1,573,550.00**	**99.28**
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Rp217,478,050.00	Rp215,904,500.00	Rp 1,573,550.00	99.28
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**Rp787,858,200.00**	**Rp747,627,022.00**	**Rp 40,231,178.00**	**94.89**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**Rp787,858,200.00**	**Rp747,627,022.00**	**Rp 40,231,178.00**	**94.89**
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Rp215,885,000.00**	**Rp199,181,550.00**	**Rp 16,703,450.00**	**92.26**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Rp64,500,000.00**	**Rp57,833,400.00**	**Rp 6,666,600.00**	**89.66**
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp7,200,000.00	Rp6,610,000.00	Rp 590,000.00	91.81

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp15,650,000.00	Rp12,064,000.00	Rp 3,586,000.00	77.09
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp34,650,000.00	Rp33,149,400.00	Rp 1,500,600.00	95.67
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Rp7,000,000.00	Rp6,010,000.00	Rp 990,000.00	85.86
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Rp18,200,000.00**	**Rp16,188,500.00**	**Rp 2,011,500.00**	**88.95**
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp8,200,000.00	Rp7,973,000.00	Rp 227,000.00	97.23
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp10,000,000.00	Rp8,215,500.00	Rp 1,784,500.00	82.16
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Rp133,185,000.00**	**Rp125,159,650.00**	**Rp 8,025,350.00**	**93.97**
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp9,500,000.00	Rp8,016,000.00	Rp 1,484,000.00	84.38
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp115,685,000.00	Rp112,520,500.00	Rp 3,164,500.00	97.26
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp8,000,000.00	Rp4,623,150.00	Rp 3,376,850.00	57.79
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rp172,873,900.00**	**Rp172,386,000.00**	**Rp 487,900.00**	**99.72**
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Rp150,000,000.00**	**Rp150,000,000.00**	**Rp -**	**100.00**

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp150,000,000.00	Rp150,000,000.00	Rp -	100.00
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp22,873,900.00**	**Rp22,386,000.00**	**Rp 487,900.00**	**97.87**
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp22,873,900.00	Rp22,386,000.00	Rp 487,900.00	97.87
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rp116,346,500.00**	**Rp109,614,629.00**	**Rp 6,731,871.00**	**94.21**
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp55,902,500.00**	**Rp51,945,429.00**	**Rp 3,957,071.00**	**92.92**
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp9,857,500.00	Rp9,542,500.00	Rp 315,000.00	96.80
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp36,044,500.00	Rp32,420,429.00	Rp 3,624,071.00	89.95
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp10,000,500.00	Rp9,982,500.00	Rp 18,000.00	99.82
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp29,931,500.00**	**Rp29,687,000.00**	**Rp 244,500.00**	**99.18**
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp9,986,500.00	Rp9,968,500.00	Rp 18,000.00	99.82

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp9,972,500.00	Rp9,885,500.00	Rp 87,000.00	99.13
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp9,972,500.00	Rp9,833,000.00	Rp 139,500.00	98.60
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp30,512,500.00**	**Rp27,982,200.00**	**Rp 2,530,300.00**	**91.71**
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp30,512,500.00	Rp27,982,200.00	Rp 2,530,300.00	91.71
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Rp17,530,000.00**	**Rp16,433,286.00**	**Rp 1,096,714.00**	**93.74**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp17,530,000.00**	**Rp16,433,286.00**	**Rp 1,096,714.00**	**93.74**
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp10,000,000.00	Rp9,819,286.00	Rp 180,714.00	98.19
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp7,530,000.00	Rp6,614,000.00	Rp 916,000.00	87.84
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Rp110,968,400.00**	**Rp108,742,467.00**	**Rp 2,225,933.00**	**97.99**
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp110,968,400.00	Rp108,742,467.00	Rp 2,225,933.00	97.99
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp110,968,400.00	Rp108,742,467.00	Rp 2,225,933.00	97.99
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Rp154,254,400.00**	**Rp141,269,090.00**	**Rp 12,985,310.00**	**91.58**

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp6,715,700.00**	**Rp6,680,700.00**	**Rp 35,000.00**	**99.48**
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp6,715,700.00	Rp6,680,700.00	Rp 35,000.00	99.48
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp147,538,700.00**	**Rp134,588,390.00**	**Rp 12,950,310.00**	**91.22**
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp66,351,400.00	Rp61,976,690.00	Rp 4,374,710.00	93.41
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp4,736,100.00	Rp4,651,500.00	Rp 84,600.00	98.21
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp76,451,200.00	Rp67,960,200.00	Rp 8,491,000.00	88.89
Jumlah Total		**Rp 18,034,821,318.00**	**Rp 17,437,573,089.00**	**Rp 597,248,229.00**	**96.69**

Tabel diatas menunjukkan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp. 18.034.821.318,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 17.437.573.089,-** dengan sisa sebesar **Rp. 597.248.229,-** atau **96,69%**. Sisa tersebut dikarenakan ada beberapa hambatan, yaitu:

a. Keterbatasan waktu pada saat perubahan anggaran dan efesiensi anggaran.
b. Verifikasi dan validasi penerima bantuan social yang belum akurat sehingga ada double BNBA dan pengembalian uang bantuan social ke Kas Daerah
c. Input By Name By Addres di SIPD untuk bansos yang memakan banyak waktu sehingga kurang maksimal dalam penyalurannya.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk kepada Bupati Nganjuk, antara lain:

1. Tahun 2023 Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan Revisi Review Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dapat mencapai dari target yang ditentukan pada awal perencanaan.
2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak dapat dihitung tingkat ketercapaiannya dikarenakan pada Revisi Review Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk tidak mencantumkan jumlah target, sehingga hal ini menjadi evaluasi Perangkat Daerah untuk perencanaan tahun berikutnya.
3. Realisasi anggaran Rp. 18.034.821.318,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.437.573.089,- dengan sisa sebesar Rp. 597.248.229,- atau 96,69%..

a. **Permasalahan:**

1. Masih belum tercapainya target penurunan PMKS/PPKS sesuai target.
2. Pemberian bantuan kepada PMKS/ PPKS masih seputar bantuan untuk kebutuhan dasar ataupun rehabilitasi, hal ini belum bisa menyentuh substansi dari pengentasan permasalahan/kemiskinan hingga tuntas.

b. **Solusi:**

1. Perlu melakukan pendataan PMKS/PPKS untuk memperoleh data PMKS/PPKS yang valid
2. Perlu dilakukan monitoring dan pendataan yang lebih rinci terhadap efektivitas program/kegiatan yang dilakukan untuk penanganan PMKS/ PPKS untuk dicari kendala dan masalahnya sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan yang akan datang.
3. Pemberian bantuan diharapkan dapat berupa sebuah bantuan kontinuitas untuk PMKS/ PPKS yang tidak mempunyai potensi. Sedangkan yang mempunyai potensi bisa berupa pemberian keterampilan, bimbingan dan modal untuk usaha, ataupun pembukaan lapangan kerja yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan.

Nganjuk, 16 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk



Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

Lampiran

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023

Formulir DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.06.2.08.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**13.224.123.478**	**94.123.092**	**0**	**0**	**13.318.246.570**	**17.058.985.178**	**187.977.940**	**0**	**0**	**17.246.963.118**	**3.928.716.548**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.831.213.278**	**71.361.392**	**0**	**0**	**4.902.574.670**	**4.857.784.078**	**165.216.240**	**0**	**0**	**5.023.000.318**	**120.425.648**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**22.887.000**	**0**	**0**	**0**	**22.887.000**	**22.887.000**	**0**	**0**	**0**	**22.887.000**	**0**	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.150.000	0	0	0	12.150.000	12.150.000	0	0	0	12.150.000	0	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.737.000	0	0	0	10.737.000	10.737.000	0	0	0	10.737.000	0	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.763.467.000**	**0**	**0**	**0**	**3.763.467.000**	**3.790.035.000**	**0**	**0**	**0**	**3.790.035.000**	**26.568.000**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.486.885.000	0	0	0	3.486.885.000	3.508.056.000	0	0	0	3.508.056.000	21.171.000	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		269.322.000	0	0	0	269.322.000	274.719.000	0	0	0	274.719.000	5.397.000	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.630.000	0	0	0	3.630.000	3.630.000	0	0	0	3.630.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
									T (Sebelum)					T (Sesudah)					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.630.000	0	0	0	3.630.000	3.630.000	0	0	0	3.630.000	0	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**87.500.000**	**0**	**0**	**0**	**87.500.000**	**87.500.000**	**0**	**0**	**0**	**87.500.000**	**0**	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87.500.000	0	0	0	87.500.000	87.500.000	0	0	0	87.500.000	0	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**247.958.278**	**1.396.392**	**0**	**0**	**249.354.670**	**247.961.078**	**1.396.392**	**0**	**0**	**249.357.470**	**2.800**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.751.068	1.396.392	0	0	11.147.460	9.751.068	1.396.392	0	0	11.147.460	0	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		129.050.050	0	0	0	129.050.050	129.052.850	0	0	0	129.052.850	2.800	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.188.910	0	0	0	50.188.910	50.188.910	0	0	0	50.188.910	0	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33.314.000	0	0	0	33.314.000	33.314.000	0	0	0	33.314.000	0	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.854.250	0	0	0	23.854.250	23.854.250	0	0	0	23.854.250	0	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**33.965.000**	**0**	**0**	**33.965.000**	**0**	**127.819.848**	**0**	**0**	**127.819.848**	**93.854.848**	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	33.965.000	0	0	33.965.000	0	127.819.848	0	0	127.819.848	93.854.848	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**221.000.000**	**0**	**0**	**0**	**221.000.000**	**221.000.000**	**0**	**0**	**0**	**221.000.000**	**0**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		144.000.000	0	0	0	144.000.000	144.000.000	0	0	0	144.000.000	0	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**488.401.000**	**36.000.000**	**0**	**0**	**524.401.000**	**488.401.000**	**36.000.000**	**0**	**0**	**524.401.000**	**0**	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		262.300.500	0	0	0	262.300.500	262.300.500	0	0	0	262.300.500	0	
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.504.400	0	0	0	8.504.400	8.504.400	0	0	0	8.504.400	0	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.500.000	0	0	0	22.500.000	22.500.000	0	0	0	22.500.000	0	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		195.096.100	36.000.000	0	0	231.096.100	195.096.100	36.000.000	0	0	231.096.100	0	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**314.996.600**	**0**	**0**	**0**	**314.996.600**	**417.627.800**	**0**	**0**	**0**	**417.627.800**	**102.631.200**	
1	**06**	**02**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**13.961.800**	**0**	**0**	**0**	**13.961.800**	**13.961.800**	**0**	**0**	**0**	**13.961.800**	**0**	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.961.800	0	0	0	13.961.800	13.961.800	0	0	0	13.961.800	0	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**301.034.800**	**0**	**0**	**0**	**301.034.800**	**403.666.000**	**0**	**0**	**0**	**403.666.000**	**102.631.200**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
									T (Sebelum)					T (Sesudah)						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.234.100	0	0	0	16.234.100	44.966.400	0	0	0	44.966.400	28.732.300	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		271.287.300	0	0	0	271.287.300	271.287.300	0	0	0	271.287.300	0	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.513.400	0	0	0	13.513.400	87.412.300	0	0	0	87.412.300	73.898.900	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**7.528.364.750**	**20.000.000**	**0**	**0**	**7.548.364.750**	**7.639.039.750**	**20.000.000**	**0**	**0**	**7.659.039.750**	**110.675.000**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**6.610.690.550**	**20.000.000**	**0**	**0**	**6.630.690.550**	**6.605.290.550**	**20.000.000**	**0**	**0**	**6.625.290.550**	**(5.400.000)**	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.216.800	0	0	0	37.216.800	37.216.800	0	0	0	37.216.800	0	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		514.000.000	0	0	0	514.000.000	514.000.000	0	0	0	514.000.000	0	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.540.645.750	0	0	0	5.540.645.750	5.535.245.750	0	0	0	5.535.245.750	(5.400.000)	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		518.828.000	20.000.000	0	0	538.828.000	518.828.000	20.000.000	0	0	538.828.000	0	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**917.674.200**	**0**	**0**	**0**	**917.674.200**	**1.033.749.200**	**0**	**0**	**0**	**1.033.749.200**	**116.075.000**	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		185.059.250	0	0	0	185.059.250	301.134.250	0	0	0	301.134.250	116.075.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		206.214.950	0	0	0	206.214.950	206.214.950	0	0	0	206.214.950	0	
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		521.400.000	0	0	0	521.400.000	521.400.000	0	0	0	521.400.000	0	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**277.482.600**	**0**	**0**	**0**	**277.482.600**	**3.861.787.700**	**0**	**0**	**0**	**3.861.787.700**	**3.584.305.100**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**277.482.600**	**0**	**0**	**0**	**277.482.600**	**3.861.787.700**	**0**	**0**	**0**	**3.861.787.700**	**3.584.305.100**	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.022.600	0	0	0	4.022.600	40.326.400	0	0	0	40.326.400	36.303.800	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		273.460.000	0	0	0	273.460.000	3.821.461.300	0	0	0	3.821.461.300	3.548.001.300	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**217.478.050**	**0**	**0**	**0**	**217.478.050**	**217.478.050**	**0**	**0**	**0**	**217.478.050**	**0**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**217.478.050**	**0**	**0**	**0**	**217.478.050**	**217.478.050**	**0**	**0**	**0**	**217.478.050**	**0**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		217.478.050	0	0	0	217.478.050	217.478.050	0	0	0	217.478.050	0	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**54.588.200**	**2.761.700**	**0**	**0**	**57.349.900**	**65.267.800**	**2.761.700**	**0**	**0**	**68.029.500**	**10.679.600**	
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**				**54.588.200**	**2.761.700**	**0**	**0**	**57.349.900**	**65.267.800**	**2.761.700**	**0**	**0**	**68.029.500**	**10.679.600**	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.588.200	2.761.700	0	0	57.349.900	65.267.800	2.761.700	0	0	68.029.500	10.679.600	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**654.823.400**	**0**	**0**	**0**	**654.823.400**	**787.858.200**	**0**	**0**	**0**	**787.858.200**	**133.034.800**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**141.000.000**	**0**	**0**	**0**	**141.000.000**	**215.885.000**	**0**	**0**	**0**	**215.885.000**	**74.885.000**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**64.500.000**	**0**	**0**	**0**	**64.500.000**	**64.500.000**	**0**	**0**	**0**	**64.500.000**	**0**	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.200.000	0	0	0	7.200.000	7.200.000	0	0	0	7.200.000	0	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.650.000	0	0	0	15.650.000	15.650.000	0	0	0	15.650.000	0	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.650.000	0	0	0	34.650.000	34.650.000	0	0	0	34.650.000	0	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**18.200.000**	**0**	**0**	**0**	**18.200.000**	**18.200.000**	**0**	**0**	**0**	**18.200.000**	**0**	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.200.000	0	0	0	8.200.000	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**58.300.000**	**0**	**0**	**0**	**58.300.000**	**133.185.000**	**0**	**0**	**0**	**133.185.000**	**74.885.000**	
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.500.000	0	0	0	9.500.000	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.800.000	0	0	0	40.800.000	115.685.000	0	0	0	115.685.000	74.885.000	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**172.874.100**	**0**	**0**	**0**	**172.874.100**	**172.873.900**	**0**	**0**	**0**	**172.873.900**	**(200)**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**0**	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**22.874.100**	**0**	**0**	**0**	**22.874.100**	**22.873.900**	**0**	**0**	**0**	**22.873.900**	**(200)**	
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.874.100	0	0	0	22.874.100	22.873.900	0	0	0	22.873.900	(200)	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**				**116.346.500**	**0**	**0**	**0**	**116.346.500**	**116.346.500**	**0**	**0**	**0**	**116.346.500**	**0**	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**55.902.500**	**0**	**0**	**0**	**55.902.500**	**55.902.500**	**0**	**0**	**0**	**55.902.500**	**0**	
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.857.500	0	0	0	9.857.500	9.857.500	0	0	0	9.857.500	0	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36.044.500	0	0	0	36.044.500	36.044.500	0	0	0	36.044.500	0	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.500	0	0	0	10.000.500	10.000.500	0	0	0	10.000.500	0	
2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**29.931.500**	**0**	**0**	**0**	**29.931.500**	**29.931.500**	**0**	**0**	**0**	**29.931.500**	**0**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
									T (Sebelum)					T (Sesudah)					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.986.500	0	0	0	9.986.500	9.986.500	0	0	0	9.986.500	0	
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.972.500	0	0	0	9.972.500	9.972.500	0	0	0	9.972.500	0	
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.972.500	0	0	0	9.972.500	9.972.500	0	0	0	9.972.500	0	
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**30.512.500**	**0**	**0**	**0**	**30.512.500**	**30.512.500**	**0**	**0**	**0**	**30.512.500**	**0**	
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.512.500	0	0	0	30.512.500	30.512.500	0	0	0	30.512.500	0	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**17.530.000**	**0**	**0**	**0**	**17.530.000**	**17.530.000**	**0**	**0**	**0**	**17.530.000**	**0**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**17.530.000**	**0**	**0**	**0**	**17.530.000**	**17.530.000**	**0**	**0**	**0**	**17.530.000**	**0**	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.530.000	0	0	0	7.530.000	7.530.000	0	0	0	7.530.000	0	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**110.968.400**	**0**	**0**	**0**	**110.968.400**	**110.968.400**	**0**	**0**	**0**	**110.968.400**	**0**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**110.968.400**	**0**	**0**	**0**	**110.968.400**	**110.968.400**	**0**	**0**	**0**	**110.968.400**	**0**	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110.968.400	0	0	0	110.968.400	110.968.400	0	0	0	110.968.400	0	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**96.104.400**	**0**	**0**	**0**	**96.104.400**	**154.254.400**	**0**	**0**	**0**	**154.254.400**	**58.150.000**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**6.715.700**	**0**	**0**	**0**	**6.715.700**	**6.715.700**	**0**	**0**	**0**	**6.715.700**	**0**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.715.700	0	0	0	6.715.700	6.715.700	0	0	0	6.715.700	0	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**89.388.700**	**0**	**0**	**0**	**89.388.700**	**147.538.700**	**0**	**0**	**0**	**147.538.700**	**58.150.000**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63.351.400	0	0	0	63.351.400	66.351.400	0	0	0	66.351.400	3.000.000	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.736.100	0	0	0	4.736.100	4.736.100	0	0	0	4.736.100	0	
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.301.200	0	0	0	21.301.200	76.451.200	0	0	0	76.451.200	55.150.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp561.157.397
Februari	Rp746.173.325
Maret	Rp694.688.617
April	Rp1.090.728.400
Mei	Rp577.487.375
Juni	Rp6.831.617.650
Juli	Rp4.579.611.107
Agustus	Rp332.394.395
September	Rp421.091.250
Oktober	Rp480.059.488
November	Rp1.589.539.510
Desember	Rp130.272.804
Jumlah	Rp18.034.821.318

Nganjuk, tanggal _____

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Drs. DARMANTONO

NIP: 196804211994031010

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota
Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Dinas Sosial PPPA pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		OPD
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																						
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																						
A	**Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**14,268,929,569**	**94%**	**1,514,098,442**	**100%**	**4,902,574,670**	**22%**	**743,507,262.00**	**29%**	**1,520,617,264.00**	**17%**	**844,148,935.00**	**28%**	**1,532,990,139.00**	**96%**	**4,641,263,600**	**96%**	**6,155,362,042**		**43%**	
I	**Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**51,169,950**	**100%**	**18,642,000**	**100%**	**22,887,000**	**25%**	**0.00**	**25%**	**0.00**	**25%**	**15,054,500.00**	**25%**	**7,806,000.00**	**100%**	**22,860,500**	**100%**	**41,502,500**		**81%**	
1	**Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	35,651,250	100%	11,642,000	100%	12,150,000	25%	0.00	25%	0.00	25%	7,228,500	25%	4,912,500	100%	12,141,000.00	100%	23,783,000		67%	
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	15,518,700	100%	7,000,000	100%	10,737,000	25%	0.00	25%	0.00	25%	7,826,000	25%	2,893,500	100%	10,719,500.00	100%	17,719,500		114%	
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**11,172,753,800**	**100%**	**185,477,860**	**100%**	**3,763,467,000**	**19%**	**545,272,541**	**19%**	**1,210,415,859**	**19%**	**614,342,010**	**19%**	**1,087,908,067**	**75%**	**3,457,938,477**	**75%**	**3,643,416,337**		**33%**	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	10,758,496,750	100%	7,040,000	100%	3,486,885,000	25%	516,809,767.00	25%	1,174,591,929	25%	534,227,191	25%	960,110,085	100%	3,185,738,972.00	100%	3,192,778,972		30%	
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	393,207,450	99%	171,210,860	100%	269,322,000	25%	28,462,774.00	25%	35,823,930.00	25%	78,663,819.00	25%	126,852,482	100%	269,803,005.00	100%	441,013,865		112%	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	10,524,800	100%	3,609,000	100%	3,630,000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	217,500	0%	217,500.00	0%	3,826,500		36%	
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lapora n	10,524,800	100%	3,618,000	100%	3,630,000	25%	0.00	25%	0.00	25%	1,451,000	25%	728,000.00	100%	2,179,000.00	100%	5,797,000		55%	
III		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**56,800,000**	**73%**	**6,400,000**	**100%**	**87,500,000**	**3%**	**2,250,000**	**87%**	**76,500,000**	**1%**	**1,250,000**	**9%**	**5,750,000**	**100%**	**85,750,000**	**100%**	**92,150,000**		**162%**	
1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	56,800,000	73%	6,400,000	100%	87,500,000	3%	2,250,000.00	87%	76,500,000.00	1%	1,250,000	9%	5,750,000	100%	85,750,000.00	100%	92,150,000		162%	
IV		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**687,925,335**	**96%**	**206,680,788**	**100%**	**249,354,670**	**25%**	**50,462,116**	**25%**	**53,694,811**	**25%**	**60,504,795**	**25%**	**81,971,191**	**100%**	**246,632,913**	**100%**	**453,313,701**		**66%**	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	30,229,870	92%	33,646,240	100%	11,147,460	25%	4,795,000.00	25%	1,105,000	25%	2,766,750	25%	2,068,500	100%	10,735,250.00	100%	44,381,490		147%	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	290,842,760	100%	93,100,618	100%	129,050,050	25%	28,959,016.00	25%	25,668,361	25%	30,940,545	25%	41,302,298	100%	126,870,220.00	100%	219,970,838		76%	
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang paket cetakan dan penggadaan yang disediakan	Paket	94,404,105	86%	32,800,150	100%	50,188,910	25%	6,305,600.00	25%	11,671,050	25%	9,526,300	25%	22,670,450	100%	50,173,400.00	100%	82,973,550		88%	
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokum en	7,200,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	25%	0.00	25%	450,000.00	25%	600,000	25%	750,000	100%	1,800,000.00	100%	3,600,000		50%	
5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lapora n	70,757,225	100%	26,527,750	100%	33,314,000	25%	6,410,000.00	25%	9,236,400	25%	8,646,700	25%	9,003,943	100%	33,297,043.00	100%	59,824,793		85%	
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lapora n	194,491,375	100%	18,806,030	100%	23,854,250	25%	3,992,500.00	25%	5,564,000	25%	8,024,500	25%	6,176,000	100%	23,757,000.00	100%	42,563,030		22%	
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan**	**100%**	**200,000,000**	**100%**	**68,450,000**	**100%**	**33,965,000**	**30%**	**33,347,400**	**0%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**70%**	**93,810,000**	**100%**	**127,157,400**	**100%**	**195,607,400**		**98%**	
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	200,000,000	100%	68,450,000	100%	33,965,000	30%	33,347,400.00	0%	0.00	0%	0.00	70%	93,810,000	100%	127,157,400.00	100%	195,607,400		98%	
VI		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100%**	**664,800,000**	**91%**	**186,649,476**	**100%**	**221,000,000**	**25%**	**39,369,955**	**25%**	**42,844,446**	**25%**	**29,393,424**	**25%**	**71,760,346**	**100%**	**183,368,171**	**100%**	**370,017,647**		**56%**	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	Lapora n	12,000,000	73%	1,435,000	100%	2,000,000	25%	300,000.00	25%	400,000	25%	9,960	25%	508,000.00	100%	1,217,960.00	100%	2,652,960		22%	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	Lapora n	420,300,000	100%	110,238,476	100%	144,000,000	25%	26,572,655.00	25%	23,696,546	25%	16,884,864	25%	40,005,846.00	100%	107,159,911.00	100%	217,398,387		52%	

DINSOSPPPA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Dinas Sosial PPPA pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		OPD
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan oenyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lapora n	232,500,000	100%	74,976,000	100%	75,000,000	25%	12,497,300.00	25%	18,747,900	25%	12,498,600	25%	31,246,500.00	100%	74,990,300.00	100%	149,966,300		65%	
VII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat**	**100%**	**1,435,480,484**	**98%**	**841,798,318**	**100%**	**524,401,000**	**25%**	**72,805,250**	**25%**	**137,162,148**	**25%**	**123,604,206**	**25%**	**183,984,535**	**100%**	**517,556,139**	**100%**	**1,359,354,457**		**95%**	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	651,165,210	100%	274,650,414	100%	262,300,500	25%	42,586,750.00	25%	59,476,600	25%	67,506,518	25%	91,635,688	100%	261,205,556.00	100%	535,855,970		82%	
2		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	150,000,000	91%	354,302,330	100%	8,504,400	25%	1,502,500.00	25%	1,800,000	25%	3,189,000	25%	2,010,000	100%	8,501,500.00	100%	362,803,830		242%	
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	110,102,969	100%	23,109,000.00	100%	22,500,000	25%	1,700,000.00	25%	12,200,000	25%	7,450,000	25%	1,150,000	100%	22,500,000.00	100%	45,609,000		41%	
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	524,212,305	100%	189,736,574.00	100%	231,096,100	25%	27,016,000.00	25%	63,685,548	25%	45,458,688	25%	89,188,847	100%	225,349,083.00	100%	415,085,657		79%	
B	**Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS yang Aktif**	**85%**	**985,436,697**	**82%**	**331,193,330**	**85%**	**314,996,600**	**5%**	**43,300,000**	**4%**	**66,628,130**	**72%**	**70,172,685**	**19%**	**227,632,313**	**100%**	**407,733,128**	**100%**	**738,926,458**		**75%**	
I		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**85%**	**49,887,775**	**80%**	**18,483,000**	**85%**	**13,961,800**	**0%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**85%**	**12,146,800.00**	**15%**	**825,000.00**	**100%**	**12,971,800**	**100%**	**31,454,800**		**63%**	
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	49,887,775	80%	18,483,000	85%	13,961,800	0%	0.00	0%	0.00	85%	12,146,800	15%	825,000	100%	12,971,800.00	100%	31,454,800		63%	
II		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang, Tenaga Kesejahteraan, Keluarga, Lembaga yang Meningkat Kapasitasnya serta Jumlah Sertifikat dari Hasil Peningkatan Jumlah Kapasitas**	**85%**	**935,548,922**	**84%**	**312,710,330**	**85%**	**301,034,800**	**10%**	**43,300,000**	**8%**	**66,628,130**	**58%**	**58,025,885**	**23%**	**226,807,313**	**100%**	**394,761,328**	**100%**	**707,471,658**		**76%**	
1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	84,226,000	85%	17,228,000	85%	16,234,100	10%	0.00	5%	825,000	70%	13,859,100	15%	27,993,300	100%	42,677,400.00	100%	59,905,400		71%	
2		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	783,096,122	85%	276,629,330	85%	271,287,300	20%	43,300,000.00	20%	65,803,130	20%	44,166,785	40%	115,702,713	100%	268,972,628.00	100%	545,601,958		70%	
3		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	68,226,800	81%	18,853,000.00	85%	13,513,400	0%	0.00	0%	0.00	85%	0.00	15%	83,111,300	100%	83,111,300.00	100%	101,964,300		149%	
C	**Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**87%**	**23,559,521,940**	**83%**	**10,078,081,324**	**87%**	**7,548,364,750**	**13%**	**209,361,050**	**29%**	**6,096,391,807**	**16%**	**1,017,362,879**	**35%**	**227,489,031**	**93%**	**7,550,604,767**	**93%**	**17,628,686,091**		**75%**	
I		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial**	**87%**	**21,028,314,505**	**85%**	**8,740,658,740.20**	**87%**	**6,630,690,550**	**4%**	**25,249,000**	**38%**	**6,022,603,419**	**6%**	**459,592,842**	**43%**	**23,632,625**	**91%**	**6,531,077,886**	**91%**	**15,271,736,626**		**73%**	
1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130,319,280	85%	56,369,961.40	87%	37,216,800	13%	5,000,000.00	17%	6,471,700	1%	10,808,300	68%	11,237,980	99%	33,517,980.00	99%	89,887,941		69%	
2		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usioa Terlantar, serta Gelandangan Penegemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1,588,656,800.000	85%	735,956,000.00	87%	514,000,000	0%	0.00	50%	489,127,500	7%	3,150,000	7%	0.00	64%	492,277,500.00	64%	1,228,233,500		77%	
3		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	17,979,728,150	85%	7,366,241,273.40	87%	5,540,645,750	1%	4,939,000.00	80%	5,506,231,630.00	6%	9,209,785.00	12%	- 38,398,230.00	99%	5,481,982,185.00	99%	12,848,223,458		71%	
4		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1,329,610,275	83%	582,091,505.40	87%	538,828,000	3%	15,310,000.00	4%	20,772,589	10%	436,424,757	83%	50,792,875	100%	523,300,221.00	100%	1,105,391,726		83%	
II		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani**	**87%**	**2,531,207,435**	**82%**	**1,337,422,584**	**87%**	**917,674,200**	**22%**	**184,112,050**	**20%**	**73,788,388**	**26%**	**557,770,037**	**28%**	**203,856,406**	**95%**	**1,019,526,881**	**95%**	**2,356,949,465**		**93%**	
1		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	314,438,040	85%	363,893,123	87%	185,059,250	73%	154,575,000.00	14%	25,271,750	0%	0.00	13%	115,790,000	100%	295,636,750.00	100%	659,529,873		210%	
2		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	623,249,395	77%	180,960,460	87%	206,214,950	14%	29,537,050.00	23%	46,416,638	1%	34,920,037	59%	86,616,406	97%	197,490,131.00	97%	378,450,591		61%	

DINSOSPPPA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Dinas Sosial PPPA pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		OPD
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	21,000,000	80%	8,489,000	87%	5,000,000	0%	0.00	42%	2,100,000.00	16%	1,450,000	27%	1,450,000	85%	5,000,000.00	85%	13,489,000		64%	
4		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Orang	1,572,520,000	85%	784,080,000	87%	521,400,000	0%	0.00	0%	0.00	87%	521,400,000	13%	0	100%	521,400,000.00	100%	1,305,480,000		83%	
D		**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**87%**	**2,168,299,542**	**75%**	**3,659,560,850**	**87%**	**277,482,600**	**4%**	**290,000**	**43%**	**271,021,000**	**0%**	**0.00**	**54%**	**3540290200.00**	**100%**	**3,811,601,200**	**100%**	**7,471,162,050**		**345%**	
I		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**87%**	**2,168,299,542**	**75%**	**3,659,560,850**	**87%**	**277,482,600**	**4%**	**290,000**	**43%**	**271,021,000**	**0%**	**0.00**	**54%**	**3540290200.00**	**100%**	**3,811,601,200**	**100%**	**7,471,162,050**		**345%**	
1		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	399,299,542	70%	102,919,850	87%	4,022,600	7%	290,000.00	0%	0.00	0%	0.00	93%	39,301,200	100%	39,591,200.00	100%	142,511,050		36%	
2		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1,769,000,000	80%	3,556,641,000	87%	273,460,000	0%	0.00	85%	271,021,000	0%	0.00	15%	3,500,989,000	100%	3,772,010,000.00	100%	7,328,651,000		414%	
E		**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Pelayanan PMKS**	**87%**	**713,315,508**	**83%**	**5,575,995,554**	**87%**	**217,478,050**	**15%**	**33,580,000**	**30%**	**64,635,000**	**15%**	**33,000,000**	**40%**	**84,689,500**	**100%**	**215,904,500**	**100%**	**5,791,900,054**		**812%**	
I		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**	**87%**	**713,315,508**	**83%**	**5,575,995,554**	**87%**	**217,478,050**	**15%**	**33,580,000**	**30%**	**64,635,000**	**15%**	**33,000,000**	**40%**	**84,689,500**	**100%**	**215,904,500**	**100%**	**5,791,900,054**		**812%**	
1		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	713,315,508	83%	5,575,995,554	87%	217,478,050	15%	33,580,000.00	30%	64,635,000	15%	33,000,000	40%	84,689,500	100%	215,904,500.00	100%	5,791,900,054		812%	
F		**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase Fasilitasi TMP**	**85%**	**144,857,092**	**85%**	**51,658,090**	**85%**	**57,349,900**	**10%**	**4,840,000**	**20%**	**8,140,859**	**35%**	**6,849,672**	**35%**	**40,541,341**	**100%**	**60,371,872**	**100%**	**112,029,962**		**77%**	
A		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**85%**	**144,857,092**	**85%**	**51,658,090**	**85%**	**57,349,900**	**10%**	**4,840,000**	**20%**	**8,140,859**	**35%**	**6,849,672**	**35%**	**40,541,341**	**100%**	**60,371,872**	**100%**	**112,029,962**		**77%**	
1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	144,857,092	85%	51,658,090	85%	57,349,900	10%	4,840,000.00	20%	8,140,859.00	35%	6,849,672	35%	40,541,341	100%	60,371,872.00	100%	112,029,962		77%	
		Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																						
		Urusan Pemerintahan Bidang PPPA																						
A	**Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender**	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**	**100%**	**563,755,000**	**82%**	**310,875,177**	**100%**	**141,000,000**	**2%**	**2,887,500**	**5%**	**19,589,344**	**37%**	**56,252,285**	**56%**	**120,452,421**	**100%**	**199,181,550**	**100%**	**510,056,727**		**90%**	
I		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100%**	**255,002,500**	**100%**	**83,737,277**	**100%**	**64,500,000**	**1%**	**0.00**	**4%**	**4,956,844.00**	**71%**	**35,945,785.00**	**24%**	**16,930,771.00**	**100%**	**57,833,400**	**100%**	**141,570,677**		**56%**	
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	14,760,000	100%	7,181,000	100%	7,200,000	0%	0.00	0%	0.00	76%	5,460,000.00	24%	1,150,000.00	100%	6,610,000.00	100%	13,791,000		93%	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	98,810,000	100%	45,982,500.00	100%	15,650,000	0%	0.00	0%	0.00	77%	12,064,000	23%	0.00	100%	12,064,000.00	100%	58,046,500		59%	
3		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	124,932,500	100%	22,805,777.00	100%	34,650,000	5%	0.00	14%	4,956,844.00	45%	12,411,785.00	36%	15,780,771.00	100%	33,149,400.00	100%	55,955,177		45%	
4		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	16,500,000	100%	7,768,000.00	100%	7,000,000	0%	0.00	0%	0.00	86%	6,010,000.00	14%	0.00	100%	6,010,000.00	100%	13,778,000		84%	
II		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**100%**	**159,487,500**	**50%**	**8,445,000**	**100%**	**18,200,000**	**0%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**100%**	**16,188,500.00**	**100%**	**16188500.00**	**100%**	**24,633,500**		**15%**	
1		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi dan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	141,755,000	0%	0.00	100%	8,200,000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	100%	7,973,000	100%	7,973,000.00	100%	7,973,000		6%	

DINSOSPPPA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Dinas Sosial PPPA pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		OPD
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Organisasi	17,732,500	100%	8,445,000	100%	10,000,000	0%	0.00	0%	0.00	0	0.00	100%	8,215,500	100%	8,215,500.00	100%	16,660,500		94%	
III		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terbentuknya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Ko ta dan Terlaksananya Workshop bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi**	**100%**	**149,265,000**	**97%**	**218,692,900**	**100%**	**58,300,000**	**5%**	**2,887,500**	**12%**	**14,632,500**	**41%**	**20,306,500**	**42%**	**87,333,150**	**100%**	**125,159,650**	**100%**	**343,852,550**		**230%**	
1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	19,475,000	95%	8,655,000	100%	9,500,000	0%	0.00	0%	0.00	100%	8,016,000	0%	0.00	100%	8,016,000.00	100%	16,671,000		86%	
2		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	89,790,000	97%	135,037,900	100%	40,800,000	14%	2,887,500.00	36%	14,632,500	23%	12,290,500	27%	82,710,000.00	100%	112,520,500.00	100%	247,558,400		276%	
3		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	-	40,000,000	100%	75,000,000	100%	8,000,000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	100%	4,623,150	100%	4,623,150.00	100%	79,623,150		199%	
B	**Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**	**100%**	**222,324,100**	**100%**	**91,874,100**	**100%**	**172,874,100**	**0%**	**0.00**	**2%**	**0.00**	**50%**	**150,000,000.00**	**48%**	**22,386,000.00**	**100%**	**172,386,000**	**100%**	**264,260,100**		**119%**	
I		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perempuan Korban Kekerasan terhadap Kabupaten/ Kota yang Mendapat Layanan Pengaduan dan Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi**	**100%**	**220,000,000**	**100%**	**75,000,000.00**	**100%**	**150,000,000**	**0%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**100%**	**150,000,000.00**	**0%**	**0.00**	**100%**	**150,000,000**	**100%**	**225,000,000**		**102%**	
1		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	220,000,000	100%	75,000,000	100%	150,000,000	0%	0.00	0%	0.00	100%	150,000,000.00	0%	0.00	100%	150,000,000.00	100%	225,000,000		102%	
II		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan; Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas; Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Spesifik; Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**100%**	**2,324,100**	**100%**	**16,874,100**	**100%**	**22,874,100**	**0%**	**0.00**	**4%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**96%**	**22,386,000.00**	**100%**	**22386000.00**	**100%**	**39,260,100**		**1689%**	
1		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan/ Kota	Dokumen	2,324,100	100%	16,874,100.00	100%	22,874,100	0%	0.00	4%	0.00	0%	0.00	96%	22,386,000	100%	22,386,000.00	100%	39,260,100		1689%	
C		**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100%**	**329,491,477**	**97%**	**132,959,340**	**100%**	**116,346,500**	**30%**	**17,493,000**	**17%**	**12,412,868**	**31%**	**18,187,185**	**22%**	**61,521,576**	**100%**	**109,614,629**	**100%**	**242,573,969**		**74%**	
I		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Persentase Keluarga yang melaksanakan pendidikan Kesetaraan Gender dalam Keluarga**	**100%**	**164,627,442**	**95%**	**64,623,766**	**100%**	**55,902,500**	**22%**	**2,700,000**	**18%**	**4,978,268**	**40%**	**3,341,785**	**20%**	**40,925,376**	**100%**	**51,945,429**	**100%**	**116,569,195**		**71%**	
1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah	30,750,000	95%	13,477,250	100%	9,857,500	20%	0.00	20%	0.00	60%	0.00	0%	9,542,500	100%	9,542,500.00	100%	23,019,750		75%	

DINSOSPPPA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Dinas Sosial PPPA pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		OPD
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	85,597,442	95%	38,145,016	100%	36,044,500	25%	2,700,000.00	14%	4,978,268	61%	3,341,785	0%	21,400,376	100%	32,420,429.00	100%	70,565,445		82%	
3		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	48,280,000	95%	13,001,500.00	100%	10,000,500	20%	0.00	20%	0.00	0%	0.00	60%	9,982,500.00	100%	9,982,500.00	100%	22,984,000		48%	
II		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penguatan dan pengambangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten**	**100%**	**81,999,385**	**97%**	**35,352,250**	**100%**	**29,931,500**	**43%**	**9,833,000**	**10%**	**0.00**	**27%**	**9,885,500**	**20%**	**9,968,500**	**100%**	**29,687,000**	**100%**	**65,039,250**		**79%**	
1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	100%	30,749,590	100%	13,755,250.00	100%	9,986,500	20%	0.00	20%	0.00	0%	0.00	60%	9,968,500	100%	9,968,500.00	100%	23,723,750		77%	
2		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	30,749,795	95%	13,014,500.00	100%	9,972,500	10%	0.00	10%	0.00	80%	9,885,500.00	0%	0.00	100%	9,885,500.00	100%	22,900,000		74%	
3		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	20,500,000	95%	8,582,500	100%	9,972,500	100%	9,833,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	100%	9,833,000.00	100%	18,415,500		90%	
III		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**82,864,650**	**100%**	**32,983,324**	**100%**	**30,512,500**	**25%**	**4,960,000**	**24%**	**7,434,600**	**25%**	**4,959,900**	**26%**	**10,627,700**	**100%**	**27,982,200**	**100%**	**60,965,524**		**74%**	
1		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	82,864,650	100%	32,983,324.00	100%	30,512,500	25%	4,960,000.00	24%	7,434,600.00	25%	4,959,900.00	26%	10,627,700	100%	27,982,200.00	100%	60,965,524		74%	
D		**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak**	**100%**	**35,936,500**	**100%**	**16,688,686**	**100%**	**17,530,000**	**20%**	**3,300,000**	**43%**	**6,519,286**	**20%**	**0.00**	**18%**	**9819286.00**	**100%**	**19,638,572**	**100%**	**36,327,258**		**101%**	
I		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam Aplikasi; Jumlah Data Gender dan Anak Bahan Analisis dan Penyajian Data**	**100%**	**35,936,500**	**100%**	**16,688,686**	**100%**	**17,530,000**	**20%**	**3,300,000**	**43%**	**6,519,286**	**20%**	**0.00**	**18%**	**9819286.00**	**100%**	**19,638,572**	**100%**	**36,327,258**		**101%**	
1		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	20,500,000	100%	9,562,686	100%	10,000,000	20%	3,300,000.00	65%	6,519,286	15%	0.00	0%	0.00	100%	9,819,286.00	100%	19,381,972		95%	
2		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	15,436,500	100%	7,126,000	100%	7,530,000	20%	0.00	20%	0.00	25%	0.00	35%	9,819,286	100%	9,819,286.00	100%	16,945,286		110%	
E	**Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**424,116,090**	**78%**	**139,416,906**	**100%**	**110,968,400**	**10%**	**9,544,000**	**33%**	**36,625,680**	**50%**	**16,496,035**	**7%**	**46,076,752**	**100%**	**108,742,467**	**100%**	**248,159,373**		**59%**	
I		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Gugus Tugas Kabupaten dan Jumlah Penguatan Kecamatan Layak Anak**	**100%**	**424,116,090**	**78%**	**139,416,906**	**100%**	**110,968,400**	**10%**	**9,544,000**	**33%**	**36,625,680**	**50%**	**16,496,035**	**7%**	**46,076,752**	**100%**	**108,742,467**	**100%**	**248,159,373**		**59%**	
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	424,116,090	78%	139,416,906	100%	110,968,400	10%	9,544,000.00	33%	36,625,680	50%	16,496,035	7%	46,076,752	100%	108,742,467.00	100%	248,159,373		59%	
F	**Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**	**100%**	**671,160,000**	**47%**	**64,889,404**	**100%**	**96,104,400**	**19%**	**14,661,500**	**3%**	**12,658,919**	**72%**	**36,269,543**	**6%**	**77679128.00**	**100%**	**141,269,090**	**100%**	**206,158,494**		**31%**	
I		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**	**100%**	**321,160,000**	**94%**	**64,889,404**	**100%**	**6,715,700**	**0%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**100%**	**6,680,700**	**0%**	**0.00**	**100%**	**6,680,700**	**100%**	**71,570,104**		**22%**	
1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	321,160,000	94%	64,889,404	100%	6,715,700	0%	0.00	0%	0.00	100%	6,680,700	0%	0.00	100%	6,680,700.00	100%	71,570,104		22%	

DINOSPPPA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Dinas Sosial PPPA pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		OPD
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
II		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi serta penguatan Kelembagaan KLA,Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak, Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**	**100%**	**350,000,000**	**0%**	**0.00**	**100%**	**89,388,700**	**39%**	**14,661,500**	**7%**	**12,658,919**	**43%**	**29,588,843**	**11%**	**77,679,128**	**100%**	**134,588,390**	**100%**	**134,588,390**		**38%**	
1		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150,000,000	0%	0.00	100%	63,351,400	16%	10,010,000.00	20%	12,658,919	30%	9,187,843	34%	30,119,928	100%	61,976,690.00	100%	61,976,690		41%	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	125,000,000	0%	0.00	100%	4,736,100	100%	4,651,500.00	0%	0	0%	0	0%	0.00	100%	4,651,500.00	100%	4,651,500		4%	
3		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	75,000,000	0%	0.00	100%	21,301,200	0%	0.00	0%	0.00	100%	20,401,000	0%	47,559,200	100%	67,960,200.00	100%	67,960,200		91%	

Catatan :

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya komitmen yang baik antara Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, dan Masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan, penanganan kasus perempua dan anak serta mengembangkan Kota Layak Anak

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja
: Belum adanya data kemiskinan yang akurat serta sinergi antara data PD, BPS, dan BAPPENAS
: Adanya tradisi yang melekat pada masyarakat sehingga kurang tanggap terhadap isu kesetaraan dan keadilan gender
: Kurangnya SDM Perempuan untuk ikut andil dalam pembangunan
: Terbatasnya anggaran untuk pengangaran responsif gender

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
: Perbaikan pada target yang khususnya Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang sebelumnya satuan target "orang" menjadi "orang/bulan"
: Menindaklanjuti hasil evaluasi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
: Penyesuaian kebutuhan yang sudah diusulkan pada Renja Perubahan Tahun 2023 perlu diperhatikan dalam pelaksanaan realisasinya

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya
: Memperhatikan dan mencermati kembali konsistensi antara renstra dan renja periode berikutnya
: Kualitas laporan renja perlu ditindaklanjuti agar sesuai dengan keadaan PD dan anggaran yang usulkan pada RKPD
: Adanya laporan evaluasi anggaran maupun fisik setiap triwulan pada renja masing-masing PD



Nganjuk, 10 Januari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL PPPA
KABUPATEN NGANJUK

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi, No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Tlp. (0358) 3550772 Faks (0358) 3550772

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA
Jabatan : Plt. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI NGANJUK

Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, S.E, S.H, M.M., M.BA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS SOSIAL,PPPA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP: 19721208 199803 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	a. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	a) Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	95 %	
		b) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurun	3,87%	
	b. Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	a) Persentase jumlah PSKS yang aktif	65%	
3	a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	a) Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	45%	
	b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	a) Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	
		b) Persentase Kecamatan Layak Anak	15%	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.548.364.750,00	
2	Pemberdayaan Sosial	Rp. 314.996.600,00	
3	Rehabilitasi Sosial	Rp. 7.548.364.750,00	
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 277.482.600,00	
5	Penanganan Bencana	Rp. 217.478.050,00	
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 57.349.900,00	
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 141.000.000,00	
8	Perlindungan Perempuan	Rp. 172.874.100,00	
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 116.346.500,00	
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 17.530.000,00	
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 110.968.400,00	
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 96.104.400,00	
Jumlah Total		**Rp. 13.973.069.970,00**	

Nganjuk, Januari 2023

BUPATI NGANJUK

Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, S.E, S.H, M.M., M.BA

KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KABUPATEN NGANJUK

NAFIAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP: 19721208 199803 1 005

Program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Bencana **Rp. 8.043.325.400,00** terdiri dari Kegiatan :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 6.630.690.550,00	
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 917.674.200,00	
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 277.482.600,00	
4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 217.478.050,00	
Jumlah Total		**Rp. 8.043.325.400,00**	

Nganjuk, Januari 2023

BUPATI NGANJUK

Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, S.E, S.H, M.M., M.BA

KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KABUPATEN NGANJUK

NAFILAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP: 19721208 199803 1 005